

**DISERTASI**

**DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

***DETERMINANT ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA***

**ASNI  
A013191008**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **DISERTASI**

**DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

***DETERMINANT ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA***

**Disertasi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Program Studi Ilmu Ekonomi**

**Disusun dan di ajukan oleh :**

**ASNI  
A013191008**



**Kepada**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**


Disusun dan diajukan oleh

**ASNI**  
**A013191008**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Doktor pada 29 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pada  
Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:  
Promotor,



Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec  
NIP 194603131975031001

Ko-promotor I



Dr. Sabir, SE., M.Si  
NIP 197407152002121003

Ko-promotor II



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE, M.Si,  
NIP 196608111991032001

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Dr. Madris, SE., M.Si  
NIP 196012311988111002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM  
NIP 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Asni  
NIM : A013191008  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

menyatakan dengan sebenar –benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

### **DETERMINAN UTANG LUAR NEGERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan /ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat di buktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (UU NO 2 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar.23 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Asni

## **PRAKATA**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa, Tuhan yang maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Doktor pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang memegang setiap kejadian, mengangkat setiap kemuliaan, penyempurna dari setiap kebahagiaan umat manusia, pelimpah rahmat dan karuniaNya. Salam dan Salawat semoga senantiasa menyelimuti Baginda Rasulullah tercinta, keluarga, serta sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dan konsisten pada ajaranNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi yang berjudul “ Determinan utang luar negeri dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia”.

Pada isi Disertasi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada: Bapak Prof Dr. I Made Benyamin, S.E., MA Guru besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sebagai Promotor. Beliau yang memiliki kemampuan Ilmu serta kegigihan, kepiawaian, dan kecerdasan dalam ilmu ekonomi, kuantitatif, serta dengan wawasan berpikir, kearifan beliau sebagai ilmuan, sehingga proses pembimbingan hampir meminimalkan kendala yang dihadapi. Keterbukaan beliau tidak ada batas waktu dan ruang dalam proses bimbingan, semua berjalan dengan lancar dan efektif, serta tetap dalam proses dan koridor akademik yang terjaga, mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini. Bapak Dr.Sabir,S.E.,MS. Doktor dalam Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Pembangunan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin selaku Co-Promotor 1. Meskipun sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tidak mengurangi sedikitpun ruang dan waktu untuk penulis dalam proses konsultasi. Di sela-sela kesibukan beliau tetap menyempatkan

waktunya untuk memberikan perhatian dan membimbing penulis dengan penuh bijak dan motivasi yang tinggi, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Ibu Dr. Sri Unday Nurbayani, SE, M.Si, Doktor dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin selaku Co-Promotor II. Dengan kegigihan dan kesabaran, kecerdasan dalam ilmu ekonomi kuantitatif, wawasan berpikir, dan kearifan beliau banyak memberikan pengarahan positif sehingga dalam proses pembimbingan mengurangi kendala yang dihadapi. Keterbukaan beliau dalam pengarahan untuk perbaikan tidak ada batas waktu dan ruang, semua berjalan lancar serta tetap dalam proses dan koridor akademik yang terjaga, memacu penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini pada waktu yang tepat.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S3, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada, Prof Dr. Ir. Jamaluddin Nyompa, M.Sc ,Rektor UNHAS periode 2022 — 2025. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP., beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Madris, S.E., DPS., M.Si., CWM sebagai ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS (sekarang). Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi UNHAS. Prof. Basri Hasanuddin, MA., Prof. Dr. Rahmatia, MA; Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec; Prof. Dr. Nursini, SE., MA; Prof.; Dr. Tadjuddin Parenta, S.E., MA; Dr. Agussalim, S.E., M.Si; Dr. Sultan, SE., M.Si; Dr. Paulus Uppun, MA;, Dr. Indraswati T.R., SE., MA., CWM; Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.,P.hD;; Dr. Ir. Muhammad Jibril Tojibu, SE., M.Si. Serta ucapan terimakasih yang setinggi tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Rahmatia, MA; Dr. Fatmawati, M.Si., , Bapak Dr. Sultan, SE., M.Si; Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si sebagai penguji internal, yang telah meluangkan waktu untuk menguji, meneliti keabsahan, memberikan kritik, saran yang sangat berguna serta dengan kearifannya juga memberikan kontribusi keilmuan yang sangat berharga dalam setiap tahapan perbaikan Disertasi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Ibu. Dr. Hj. Andi Adawiah Rektor Universitas Lamappapoleonro Soppeng beserta keluarga besar universitas lamappapoleonro yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dan penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman mahasiswa S3 angkatan 2019 1 dan 2 program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS serta teman-teman HIMADIE

Penulis menyampaikan puji syukur dan sembah sujud kepada kedua orang tua, ayahanda H Asnawi Musa Dan ibunda Hj.Habibi Baco yang telah memberikan begitu banyak bantuan baik materi maupun moril dan mengajarkan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis serta motivasi yang kuat dalam penyelesaian studi di Program S3 Unhas. Teristimewa dan lebih khusus kepada Anakda tercinta A.Anisah Nurfahmi Huriyah dan A.Anugrah Arsyl Putra yang selalu menjadi penyemangat dan mendorong penulis secepatnya menyelesaikan penyusunan Disertasi ini. Dan terimakasih yang setinggi tingginya kepada saudari Dr.Yuliani Asnawi.,SE,MM yang selalu mendorong untuk secepatnya menyelesaikan studi saya dan juga ucapan terimakasih yang setinggi tingginya kepada saudara Kardiman Asnawi, SE,MM beserta istri yang selalu memberikan bantuan tanpa batasan ruang dan waktu serta terimakasih yang setinggi tingginya saya ucapkan kepada saudari Sriwana Asnawi.,SPd yang dengan tulus menjaga dan mengasuh anak saya di tengah tengah kesibukannya selama saya menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Ekonomi Unhas.

Sebagai rasa syukur dalam kesempatan ini penulis panjatkan doa: “Robbi auzi’ni an asykuro ni’matakallatii an’amta ‘alaiya wa’alaa waalidaiya wa an ‘akmala shoolikhan tardhoohu wa ashlikhlii fii dzurriyyatii ini tubtu ilaika wa innii minalmuslimiina” (Ya Tuhanku, tunjukilah/ilhamilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholeh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri). Dan semua handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan nama mereka satu

persatu yang ikut andil memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga penyusunan penulisan disertasi ini dapat terwujud. Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan khususnya pada kebijakan pembangunan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kajian pembangunan ekonomi serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan Disertasi ini.

**Makassar, 25 Oktober 2023**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ASNI', with a vertical line at the end.

**ASNI**



## ABSTRAK

ASNI. *Determinan Utang Luar Negeri dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (dibimbing oleh I Made Benyamin, Sabir, dan Sri Unday Nurbayani).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pariwisata, inflasi, dan korupsi terhadap utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia periode 1995 – 2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur/ *Path* analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri dan pembangunan pariwisata. Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap utang luar negeri sedangkan korupsi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap utang luar negeri. Pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pariwisata, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan korupsi berpengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa selain inflasi, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui utang luar negeri.

Kata kunci: pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan pariwisata, inflasi, korupsi, utang luar negeri, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

ASNI. *Determinants of Foreign Debt and Its Impact on Economic Growth in Indonesia* (supervised by I Made Benjamin, Sabir, and Sri Unday Nurbayani)

This research aims to analyze the effect of road infrastructure development, tourism development, inflation and corruption on foreign debt and economic growth happening in Indonesia for the period of 1995-2022. This research used the path analysis method. The results of this research show that road infrastructure development has a positive and significant effect on foreign debt, tourism development, inflation that do not have a significant effect on foreign debt, while corruption has a significant positive influence on foreign debt. Road infrastructure development, tourism development, inflation do not have a significant effect on economic growth, while corruption has a positive and significant effect on economic growth. Sobel test results show that apart from inflation, these three variables have a significant positive effect on economic growth through foreign debt.

Keywords: road infrastructure development, tourism development, inflation, corruption, foreign debt, economic growth



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	IV
PRAKATA .....	V
ABSTRAK .....	VIII
<i>ABSTRACK</i> .....	IX
DAFTAR .....	X
DAFTAR TABEL .....	XIV
DAFTAR GAMBAR .....	XV
DAFTAR LAMPIRAN .....	XVI
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	26
1.3 Tujuan Penelitian .....	26
1.4 Kegunaan Penelitian .....	27
1.5 Manfaat Penelitian .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
2.1. TINJAUAN TEORI DAN KONSEP .....	29
2.1.1. The Stage Of Economic Growth.....s .....	29
2.1.2. Teori Ketergantungan dan Modernisasi.....	31
2.1.3. Teori Harrod Domar .....	32
2.1.5. Teori GONE (G ONE Theory) .....	34
2.1.6. Wilingnes and Opportunity.....	35
2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi .....	36
2.1.8. Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	40
2.1.9. Inflasi .....	45
2.1.10. Utang Luar Negeri.....	48
2.1.11. Indeks Persepsi Korupsi.....	52
2.2. KETERKAITAN TEORITIS .....	59

2.2.1. Keterkaitan Teoritis Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi .....	63
2.2.2. Keterkaitan Teoritis Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi .....	63
2.2.3. Keterkaitan Teoritis Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi.....	66
2.2.4. Keterkaitan Teoritis Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	68
2.2. TINJAUAN EMPIRIS.....	72
<b>BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN TEORITIS .....</b>	<b>79</b>
3.1. Kerangka Pemikiran .....	79
3.2. Hipotesis.....	89
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>91</b>
4.1. Rancangan Penelitian .....	91
4.2. Obyek dan Teknik Pengambilan Sampel .....	91
4.3. Jenis dan Sumber Data.....	92
4.4. Metode Pengumpulan Data .....	92
4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	92
4.6. Teknik Analisis Data.....	93
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>95</b>
5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	95
5.2. Statistik Deskriptip .....	95
5.3. Pengujian Asumsi Normalitas.....	97
5.4. Pengujian Asumsi Multikolineritas.....	98
5.5. Pengujian Asumsi Heterokedastisitas .....	99
5.6. Pengujian Regresi Linear Berganda.....	100
5.7. Pengujian Hipotesis .....	101
5.7.1. Uji Parsial .....	101
5.7.2. Uji Simultan .....	103
5.7.3. Uji Determinasi.....	103
5.7.4. Pengujian Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi .....	105
5.7.5. Pengujian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	105
5.7.6. Pengujian Utang Luar Negeri dan	

Pertumbuhan Ekonomi .....	105
5.7.7. Pengujian Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	105
<b>BAB VI PEMBAHASAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>107</b>
6.1. Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	107
6.2. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	109
6.3. Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi .....	112
6.4. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi .....	116
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
7.1. Kesimpulan .....	119
7.2. Implikasi Teoritis .....	120
7.3. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>5.1. Statistik Deskriptif .....</b>	<b>96</b>
<b>5.2. Pengujian Normalitas.....</b>	<b>97</b>
<b>5.3. Pengujian Multikolinieritas .....</b>	<b>98</b>
<b>5.4. Pengujian Heterokedastisitas .....</b>	<b>99</b>
<b>5.5. Tabel Koefisien .....</b>	<b>102</b>
<b>5.6. Pengujian Simultan .....</b>	<b>103</b>
<b>5.7 Model Summary .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. ....	2
1.2. Panjang Jalan Berdasarkan Permukaan Tahun 1995-2022.....	8
1.3. Inflasi Indonesia.....	11
1.4. Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1995-2022 .....	17
1.5. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 1995-2022 .....	23
1.6. Kerangka Konseptual.....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

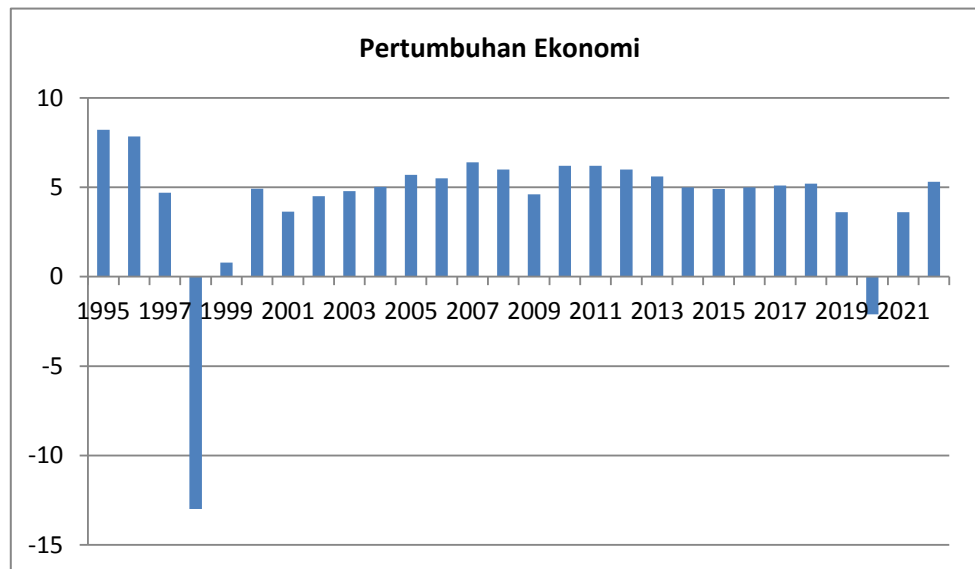
### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama dua puluh delapan tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki kendala dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan, dan digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Schumpeter's *Price Theory* dalam (Bloch, 2020) menjelaskan bahwa ekonomi berasal dari siklus bisnis dari teori ekonomi makro konvensional dan teori ekonomi stasioner, kedua teori ekonomi ini akan menciptakan ekonomi yang berkembang didalam suatu masyarakat tanpa melihat perubahan atau pengaruh dari siklus tersebut. Sedangkan menurut *The Macroeconomics of Malthus* dalam (Pullen, 2021) menjelaskan bahwa proses ekonomi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tidak terjadi begitu saja sehingga pembangunan ekonomi adalah proses naik turunnya aktifitas perekonomian didalam suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan tingkat produksi barang dan jasa dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi setiap negara negara termasuk Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan proses yang cukup lama dengan melihat berbagai sektor seperti sektor pembangunan infrastruktur, inflasi dan indeks persepsi korupsi di suatu negara. Selain hal tersebut



sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu utang luar negeri negara tersebut. Grafik berikut memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1995-2022.



**Sumber : Biro pusat statistik**

**Gambar 1.1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1995-2022**

Pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 8,23 tercatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi selama duapuluh delapan tahun terakhir dan ini dikarenakan pada masa Soeharto pemerintah fokus dibidang pertanian dan perindustrian dan sektor ekonomi bertumpu pada pemerintahan. Namun pada tahun 1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 7,82 dan kemudian menurun di angka 4,7 pada tahun 1997. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka -13,13 jauh lebih rendah pada tahun tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 1998 kondisi didalam negeri sedang bergejolak dan berdampak pada kondisi perekonomian negara. Pada saat terjadi krisis moneter

tahun 1998 negara bilateral menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi merosot menjadi minus 13,13 persen. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada tahun itu pemerintahan Soeharto melakukan kerjasama dan menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional (IMF), Badan Ini menggelontorkan dana dalam bentuk utang luar negeri untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi di segala sektor.

Pada masa pemerintahan BJ Habibie yang dikenal sebagai rezim transisi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan keuangan dan moneter sehingga posisi pertumbuhan ekonomi bisa meningkat menjadi 0,79 pada tahun 1999 dan ini tentu tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebelumnya. Pasca krisis ekonomi tahun 1998, secara perlahan ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada tahun 2000. Dibawah pemerintahan Gusdur, Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie dengan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah, kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian pertumbuhan ekonomi tetap melambat dan hanya berada di kisaran 3,64 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengalami peningkatan dari tahun 2001 dimana pertumbuhan ekonomi hanya 3,64 persen menjadi 4,5 persen pada tahun 2002. Situasi perekonomian yang mulai meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2003 menjadi 4,78 persen dan meningkat menjadi 5,03 persen pada tahun 2004. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu

adalah menjaga sektor perbankan lebih ketat dan menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung.

Pertumbuhan ekonomi di awal kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono cukup menggembirakan yakni 5,69 persen pada tahun 2005. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami naik turun pada pemerintahan SBY, tapi masih relatif stabil. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat menjadi 5,5 persen namun mengalami peningkatan pada tahun 2007 yakni 6,35 persen. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni 6,01 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada saat itu angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan masih dalam posisi seimbang. Pada awal periode ke dua pemerintahan SBY pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat yakni 4,63 persen, perlambatan tersebut merupakan dampak dari krisis finansial global yang tak hanya di rasakan oleh Indonesia tetapi juga negara lain. Pada tahun itu Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Pada saat itu AS menarik dana dari publik sehingga harga komoditas melambat di tambah dengan impor kita lebih tinggi dari ekspor. Meskipun demikian Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun 2010 ekonomi Indonesia yakni 6,22 persen. Untuk menjaga ekonomi terus tumbuh pemerintah mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49 persen, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di level 6,23 persen. Namun perlambatan kembali terjadi dengan capaian 5,56 persen pada tahun 2013 dan 5,01 persen pada tahun 2014.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, angka pertumbuhan ekonomi masih dibawah dari pemerintahan SBY. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah seperti merubah struktur APBN dengan lebih mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015 perekonomian Indonesia mengalami penurunan yakni 4,88 persen hal ini dikarenakan rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS ditambah dengan impor kita yang cenderung naik dan ekspor yang cenderung turun. Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi fokus ke RPJMN, sehingga pada tahun 2016 ekonomi Indonesia mulai tumbuh yakni 5,03 persen dan selanjutnya 5,17 persen pada tahun 2017. Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yakni 5,17 persen mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni 5,2 persen. Hal ini merupakan imbas dari perang dagang AS-China, sehingga situasi timur tengah bergejolak dan harga komoditas yang berfluktuatif dituding sebagai penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya.

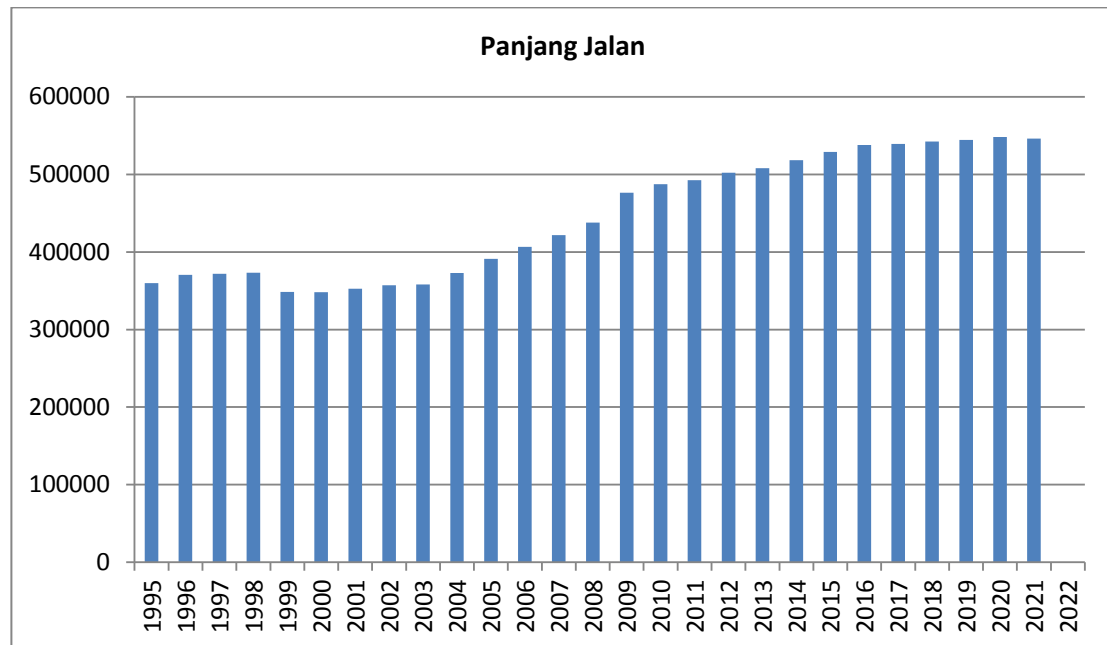
Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam yakni minus 2,07 hal ini dikarenakan pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Akibat dari hal tersebut kondisi perekonomian mengalami deflasi atau penurunan yang sangat tajam. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi wabah pandemi covid 19. Namun kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada sektor lain seperti berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga (RT) dan konsumsi lembaga non profit yang melayani

Rumah Tangga, dimana kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh terhadap PDB. Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan -2,63 persen dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga menurun menjadi -4,29 persen. Konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,94 persen. Penurunan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan LNPRT dikarenakan pemerintah mengurangi alokasi dibidang infrastruktur pada tahun 2020 dan anggaran untuk kesehatan lebih ditingkatkan untuk mengatasi pandemi di Indonesia. Selain konsumsi, Investasi juga mengalami penurunan menjadi 1,94 persen,

Suatu perekonomian tidak akan berkembang jika sarana infrastruktur tidak berkembang di suatu wilayah. Sarana infrastruktur seperti jalan raya merupakan akses yang sangat penting yang dibutuhkan, khususnya sektor perdagangan yang merupakan roda perekonomian dan merupakan perputaran arus barang dan jasa sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi tidak akan mengalami peningkatan yang berarti. Sarana infrastruktur merupakan akses utama yang dibutuhkan dalam segala sektor. Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang meliputi jalan (Radiansyah, 2012). Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan perbaikan dalam bidang infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Perbaikan sarana infrastruktur dan kegiatan perekonomian dapat berkembang dengan cepat karena di dukung oleh akses jalan yang memudahkan segala aktivitas perekonomian dan sektor lainnya. Dengan

begitu arus perdagangan semakin berkembang dan diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dalam sektor distribusi barang agar tidak terdapat ketimpangan sosial (Alif Luthfi purwadi dan Samuel Randy Tapparan 2020).

Pembangunan infrastruktur jalan sangat di perlukan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut (N. I. Kurniawan, 2015) infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kondisi permukaan jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Peningkatan kualitas permukaan jalan akan mendorong tumbuhnya aktifitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan penduduk. Dari grafik dibawah terlihat bahwa penambahan pembangunan jalan yang dibangun oleh pemerintah baik aspal maupun bukan aspal selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pengeluaran yang harus disediakan oleh negara. Anggaran yang besar dan penggunaan yang terukur dan efisiensi akan menghasilkan pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur jalan dapat meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar wilayah, memfasilitasi pergerakan orang dan barang, sehingga meningkatkan konektivitas secara keseluruhan. Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur jalan merupakan investasi yang strategis yang dapat memberikan mamfaat ekonomi dan sosial.



**Sumber : Biro Pusat Statistik**

**Gambar 1.2 Panjang Jalan Berdasarkan Permukaan tahun 1995-2022**

Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan maka akan terjadi peningkatan kapasitas produksi yang di pengaruhi oleh penambahan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Infrastruktur jalan memiliki sifat eksternalitas. Fasilitas yang di berikan oleh infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktifitas semua input dalam proses produksi. Eksternalitas positif pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (*spillover effect*) dalam bentuk peningkatan produksi sektor perusahaan dan pertanian tanpa harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja ataupun juga meningkatkan teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur tingkat produktifitas perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat. Salah satu infrastruktur yang paling terkait dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Inflasi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dalam mengatasi inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga deposito. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini mampu dan dianggap sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah yang krusial hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu inflasi yang diakibatkan oleh investasi yang sifatnya konsumtif (Nujum & Rahman, 2019). Dalam tinjauan ekonomi makro, salah satu acuan yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian adalah inflasi. Inflasi adalah fenomena dimana didalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan gejolak ekonomi. Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Berbagai pandangan mengenai dampak inflasi yaitu tahun 1958, dimana Philip menyatakan inflasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi pengangguran. Pendapat dari Philip didukung oleh tokoh perspektif struktural dan Keynesian yang menyatakan bahwa inflasi tidak berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi sedangkan pandangan moneteris menyatakan bahwa inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi (Simanungkalit, 2020).

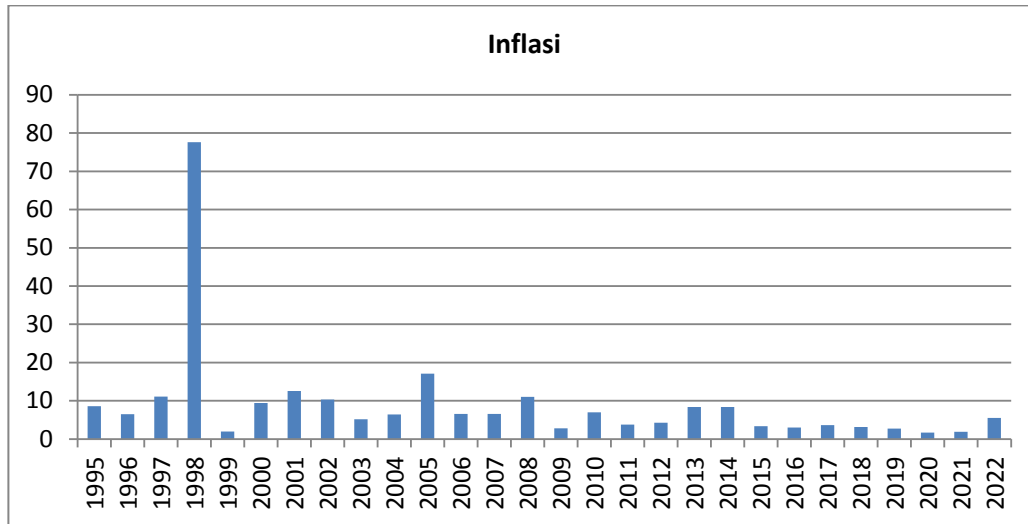
Beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yaitu *the philip curve* yang mana menjelaskan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke tingkat harga yang lebih tinggi seiring dengan menurunnya pengangguran yang diakibatkan oleh



perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan begitu juga sebaliknya. *Tradeoff* antara inflasi dan pengangguran digambarkan sebagai kurva Phillips. (Cagan, 1956).

Kurva *Phillips* menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat upah dan pengangguran. Penemuan ini diperkuat oleh fakta bahwa pergerakan dalam upah dapat dijelaskan oleh tingkat dan perubahan pengangguran. Sebuah argumen yang mendukung kurva *Phillips* adalah ekstensi yang menetapkan hubungan antara harga dan pengangguran. Ini bertumpu pada asumsi bahwa upah dan harga bergerak ke arah yang sama. Kekuatan kurva *Phillips* adalah adanya hubungan antara inflasi dan pengangguran. Inflasi akan melemahkan perekonomian sehingga daya beli masyarakat menurun yang berdampak yang berimbas pada pendapatan masyarakat. Masyarakat golongan menengah bawah dengan penghasilan tetap akan merasakan dampak yang sangat besar ketika terjadi inflasi. Hal ini dikarenakan pendapatan yang tetap tetapi harga barang-barang meningkat sehingga nilai dari pendapatan masyarakat menurun. Inflasi yang menurun sepanjang tahun mengindikasikan kondisi perekonomian di dalam negeri dalam kondisi yang baik. (Friedman, 1968).

Inflasi terjadi ketika ada pertumbuhan jumlah uang yang beredar terlalu cepat daripada pertumbuhan output. Inflasi tidak dapat dikendalikan hanya dengan kebijakan fiskal, tetapi membutuhkan kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Selain itu inflasi memiliki efek yang buruk bagi perekonomian, karena dapat mendistorsi harga-harga relatif dan memperburuk distribusi pendapatan. (Friedman, 1968)



Sumber : Biro Pusat Statistik

Gambar 1.3 Data Inflasi tahunan Indonesia 1995 – 2022

Grafik di atas terlihat bahwa tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 1995 yaitu sebesar 8.60% dan kemudian pada tahun 1996 turun menjadi 6.50%. Namun pada tahun 1997 meningkat menjadi 11,10% dan inflasi yang paling tinggi sejak dua puluh delapan tahun terakhir adalah inflasi pada tahun 1998 dimana inflasi mencapai 77,60%.

Pada tahun 1999 inflasi berhasil diturunkan pada angka 2.00%. setiap tahun menurun hal ini disebabkan oleh argumen lain yang menjelaskan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah Teori Kuantitas Uang (QTM) yang mengemukakan bahwa kuantitas uang adalah penentu utama tingkat harga, atau nilai uang, sehingga setiap perubahan dalam kuantitas uang menghasilkan perubahan langsung dan proporsional dalam tingkat harga. *The monetarist* menekankan bahwa setiap perubahan dalam kuantitas uang hanya mempengaruhi tingkat harga atau sisi moneter ekonomi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa

perubahan *supply* uang tidak mempengaruhi output riil barang dan jasa, tetapi mempengaruhi nilai dan harga dimana mereka dipertukarkan.

Selain argumen di atas ada pandangan lain tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah pandangan dari keynesian. *The Keynesian* menentang pandangan monetaris tentang hubungan antara kuantitas uang dan harga. Menurut keynesian, hubungan antara perubahan kuantitas uang dan harga adalah non proporsional dan tidak langsung melalui suku bunga. Kekuatan teori Keynesian adalah integrasi dari teori moneter dan teori output dan disatu sisi kesempatan kerja melalui suku bunga. Jadi ketika kuantitas uang meningkat, tingkat bunga jatuh, yang menyebabkan peningkatan volume investasi dan permintaan agregat, sehingga meningkatkan output dan kesempatan kerja. Dengan kata lain, *Keynesian* melihat hubungan nyata sektor ekonomi moneter yang menggambarkan keseimbangan dalam barang dan pasar uang. Menurut keynesian, ketika ada pengangguran, output dan kesempatan kerja akan berubah dalam proporsi yang sama dengan kuantitas uang, tapi tidak akan ada perubahan harga. Namun, pada kesempatan kerja penuh, perubahan kuantitas uang akan menyebabkan perubahan proporsional dalam harga.

Pandangan lain yang melihat hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang menggabungkan antara permintaan agregat dan penawaran agregat adalah teori yang mengasumsikan pandangan *Keynesian* pada jangka pendek dan pandangan klasik dalam jangka panjang. Pendekatan ini adalah pendekatan untuk mempertimbangkan perubahan pengeluaran publik atau pasokan uang nominal dan menganggap bahwa inflasi yang diharapkan

adalah nol. Akibatnya, permintaan agregat meningkat dengan keseimbangan uang riil dan tingkat harga menurun sedangkan teori *Neo Keynesian* berfokus pada produktivitas, karena penurunan skala produktivitas menyebabkan tekanan inflasi dan pelebaran kesenjangan output.

Utang luar negeri merupakan salah satu dana eksternal yang dipergunakan oleh negara berkembang dalam melaksanakan pembangunannya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Dengan adanya utang luar negeri maka pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih mudah tercapai dibandingkan ketika tidak menggunakan dana eksternal seperti utang luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam melaksanakan pembangunannya menggunakan utang luar negeri sebagai sokongan dana dalam memenuhi kekurangan dana dari dalam negeri. Untuk menutupi keterbatasan modal tersebut maka perlu ada tambahan modal dari negara yang sudah maju atau lembaga internasional dalam bentuk utang luar negeri (Ayadi, 2018).

Indonesia mulai melakukan utang luar negeri sejak masa orde lama dengan menambah sokongan dana untuk melunasi kekurangan dana pembangunan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Berdasarkan sejarah utang luar negeri bermula ketika dibentuknya *Inter Governmental Group on Indonesia* atau dikenal dengan (*IGGI*) dimana lembaga ini sebagai konsorsium negara negara kreditur kepada Indonesia. Seiring dengan waktu *IGGI* dibubarkan pada tahun 1992 karena tragedi di Deli yang membuat pemerintah Belanda tidak lagi memberikan bantuan ke Indonesia menyusul Jerman dan negara lainnya. Karena pemerintah Indonesia menganggap *Intergovernmental Group on Indonesia* atau dikenal dengan istilah

*IGGI* sudah bernuansa politis maka pemerintah memutuskan untuk tidak lagi bergabung di *IGGI*. Kemudian pada tahun yang sama yakni tahun 1992 dibentuklah *Consultative Group on Indonesia* atau (*CGI*) sebagai konsorsium negara negara kreditur sebagai kelanjutan dari *IGGI*. Namun pemerintah SBY membubarkan *CGI* karena menganggap Indonesia sudah mampu mengolah keuangan negaranya sehingga dibubarkan *CGI* pada tahun 2007. Utang luar negeri diperlukan untuk memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan domestik. Namun apabila utang luar negeri dipergunakan untuk hal yang tidak wajar maka kemungkinan besar akan mengakibatkan dampak yang negatif terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

Meskipun pemerintah selalu melakukan penambahan utang luar negeri, namun dalam peruntukan dan pengelolaannya tetap berpegang teguh pada undang undang, *best practices* dan prinsip *prudent*. Hal penting yang juga perlu dipahami, bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional, disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Penggunaan utang luar negeri diatur dalam undang undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yaitu pasal 23 ayat (1) yang berbunyi pemerintah pusat dapat menerima dan memberikan hibah atau pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dengan persetujuan DPR dan pasal 12 ayat (1) yaitu defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari PDB dan jumlah pinjaman di batasi maksimal 60% dari PDB. Menurut (Chung & Turnovsky, 2010) utang luar negeri suatu negara tergantung besarnya perubahan perubahan di dalam negeri, utang awal dan lamanya kontrak utang. Pinjaman luar negeri yang

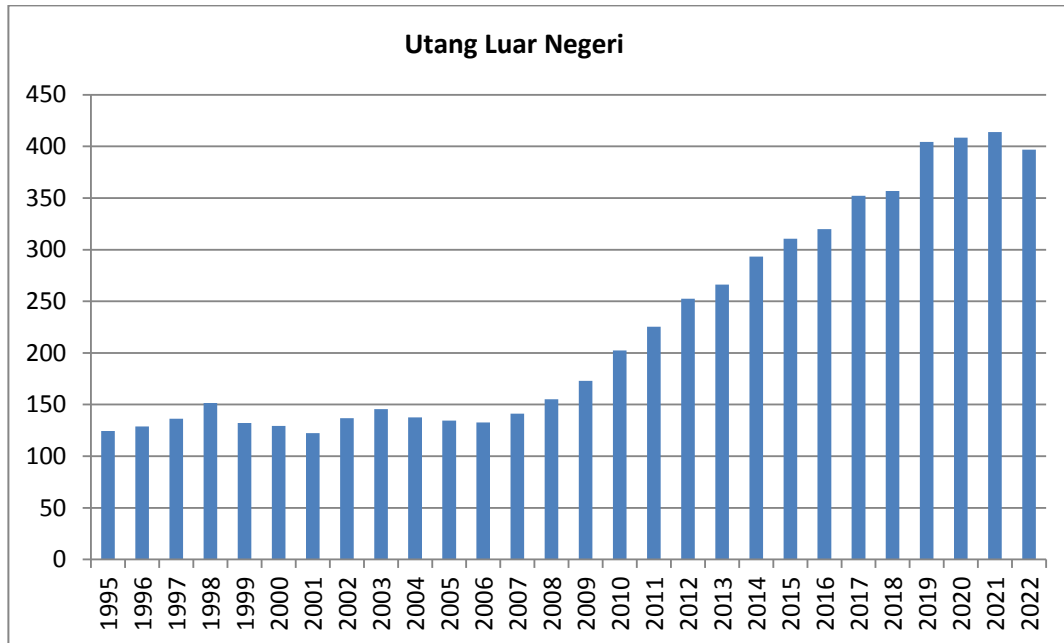
diperuntukkan untuk pembangunan jangka panjang di sektor sektor yang produktif akan mendorong sektor riil (barang dan jasa) yang akan menggerakkan roda perekonomian. Namun disisi lain utang luar negeri bisa menjadi polemik yang tak berkesudahan jika utang luar negeri salah sasaran, (Didu, 2017) dan serta (Ispriyahadi dkk, 2012).

Utang luar negeri di Indonesia yang disajikan dalam penelitian ini adalah Utang luar negeri pemerintah, bank sentral dan swasta. Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk (Bank Indonesia,2011).

Teori Harrod-Domar menguraikan bagaimana pemanfaatan bantuan dari luar negeri guna membiayai pembangunan. Pada penerapannya, kelangkaan modal diatasi dengan mendatangkan pinjaman dari luar negeri sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, tambahan stok modal diperlukan untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Teori *Three Gap Model* menyatakan bahwa timbulnya utang luar negeri dapat disebabkan antara lain: (1) biaya investasi dalam negeri lebih besar dibandingkan tabungan nasional ( $I > S$ ); (2) nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor ( $X < M$ ); (3) pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan penerimaan pajak ( $G > T$ ). Utang luar negeri dapat menjadi sumber pembiayaan yang produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pembangunan yang dibiayai dengan utang luar negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonom. Disamping itu utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, terutama untuk proyek pembangunan infrastruktur dan dapat membantu mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan integrasi ekonomi global. (Jhingan, 2000: 230).

Utang luar negeri menjadi salah satu persoalan utama dalam perekonomian Indonesia, beban utang yang menumpuk dan menjadikan Indonesia masuk dalam perangkap utang luar negeri (*debt trap*) dimana pembayaran cicilan dan bunga utang ditutup kembali dengan utang baru. Hal inilah yang membuat kekurangan pembiayaan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selalu ditutup dengan utang luar negeri. Berikut dapat dilihat perkembangan utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun .



**Sumber : Biro Pusat Statistik**

**Gambar 1.4 Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1995 – 2022**

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, pada tahun 1995 utang luar negeri Indonesia sebesar 124,3 Miliar US\$. Pada tahun 1996 utang luar negeri Indonesia tumbuh menjadi 128,9 Miliar US\$. Sementara pada tahun 1997 dimana terjadi gejolak politik didalam negeri dan mengakibatkan utang membengkak sebesar 136,3 Miliar US\$ dan puncaknya pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara di dunia dan utang luar negeri Indonesia mengalami pembengkakan sebesar 151,5 Miliar US\$. Situasi yang tidak kondusif pada masa itu membuat berbagai permasalahan dibidang ekonomi seperti menurunnya daya beli masyarakat, tingginya kemiskinan, meningkatnya pengangguran dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan, Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan kebijakan seperti: melakukan



restrukturisasi rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan Unit Pengelola Aset Negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, melakukan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengesahkan UU NO 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Mengesahkan UU NO 8 tentang perlindungan konsumen. Berbagai kebijakan tersebut mampu menurunkan utang luar negeri pada tahun 1999 sebesar 132,2 Milyar US\$.

Pada tahun 2000 utang luar negeri mengalami penurunan sebesar 129,3 Milyar US\$ dan pada tahun 2001 utang luar negeri turun sebesar sebesar 122,3 Milyar US\$. Hal ini tidak lepas dari kebijakan Gus Dur yang menolak *austerity policy* {pengetatan anggaran} sebaliknya Gus Dur menggunakan *growth story* (strategi pertumbuhan), hasil dari kebijakan Gus Dur tersebut, sektor sektor ekonomi mengalami peningkatan. Selain *growth story*, tim ekonomi Gus Dur menerapkan strategi *optimum debt management*, selain itu pada pemerintah Gus Dur, Indonesia banyak menerima dana hibah yang besar yang besar sehingga pada akhir masa jabatannya utang pemerintah Indonesia turun menjadi 122,3 Milyar US\$.

Pada tahun 2002 utang luar negeri pemerintah Indonesia naik sebesar 136,9 US\$ meskipun demikian pemerintahan Megawati Soekarno Putri tetap melakukan langkah langkah dalam mengatasi utang luar negeri pemerintah Indonesia. Adapun langkah tersebut adalah membayar utang secara bertahap, mencari pinjaman dari negara sahabat, mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN, menghapus subsidi bahan bakar minyak, mengdongkrak ekonomi rakyat dengan

ekonomi kreatif. Dan pada tahun 2003 utang luar negeri pemerintah Indonesia tumbuh sebesar 145,5 Milyar US\$ dan utang luar negeri terus meningkat dan pada tahun 2009 utang luar negeri sebesar 172,9 Milyar US\$ dan pada tahun 2010 pemerintah Indonesia melakukan banyak pembangunan sehingga utang luar negeri mencapai 202,4 milyar US\$.

Pada tahun 2014 pemerintah melakukan kebijakan penambahan utang yang lebih banyak sebesar 293,3 milyar US\$ guna mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan utang luar negeri terus meningkat sampai pada tahun 2015 sebesar 310,7 Milyar US\$. Pada tahun 2016 tersebut pemerintah membuat pembangunan lebih banyak lagi. Akibatnya perekonomian yang belum stabil sepenuhnya membuat pemerintah harus mengambil pinjaman keluar negeri lebih banyak lagi. Mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 10,14 persen, kemudian pada tahun 2018 naik sebesar 6,51 persen dan pada tahun 2019 naik sebesar 404,3 Milyar US\$, hingga pada tahun 2020 naik 1,17 persen yaitu sebesar 408, 5 Milyar US\$. Salah satu pemicu kenaikan utang luar negeri pada tahun 2020 tersebut adalah karena dampak dari adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) yang menyebabkan krisis ekonomi dan pemulihan kondisi perekonomian pasca COVID-19). Pada tahun 2021 dan tahun 2022 utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan defisit anggaran di dalam negeri akibat belanja pemerintah membengkak untuk penanganan covid 19.

Karena alasan covid 19 pemerintah beberapa kali mendapatkan pinjaman dari lembaga – lembaga internasional. Yang pertama pinjaman program Covid -19

*Active Response and Expenditure Support Program (CARES)* senilai 750 juta dollar AS dari *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*. Pinjaman ini bertujuan untuk menyediakan dukungan anggaran dalam rangka menghadapi ancaman Covid 19, yang kedua pinjaman program *Additional Financing for Social Assistance Reform program* senilai 400 juta dollar US\$ dari Bank Dunia (*World Bank*). tujuannya untuk mendukung penguatan dan perluasan Program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya serta mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi *Covid -19*. Dan yang ketiga pinjaman program *Indonesia Emergency Response to Covid -19* yang merupakan pembiayaan bersama (*Co-Financing*) antara AIIB senilai 250 juta US\$, pinjaman ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh *Covid-19*. Adapun secara umum penyebab meluasnya utang luar negeri disetiap tahunnya, karena pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan dana untuk perekonomian. Disatu sisi pinjaman merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam anggaran dan disisi lain sebagai pembayaran pinjaman yang jatuh tempo juga menjadi beban dalam anggaran pemerintah sebagai pos pengeluaran yang harus diperhitungkan, hal yang demikian menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah mengingat kondisi pinjaman luar negeri Indonesia saat ini memang telah mencapai jumlah yang sangat besar dan memprihatinkan.

Berkaitan dengan agresifnya pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini dengan menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan

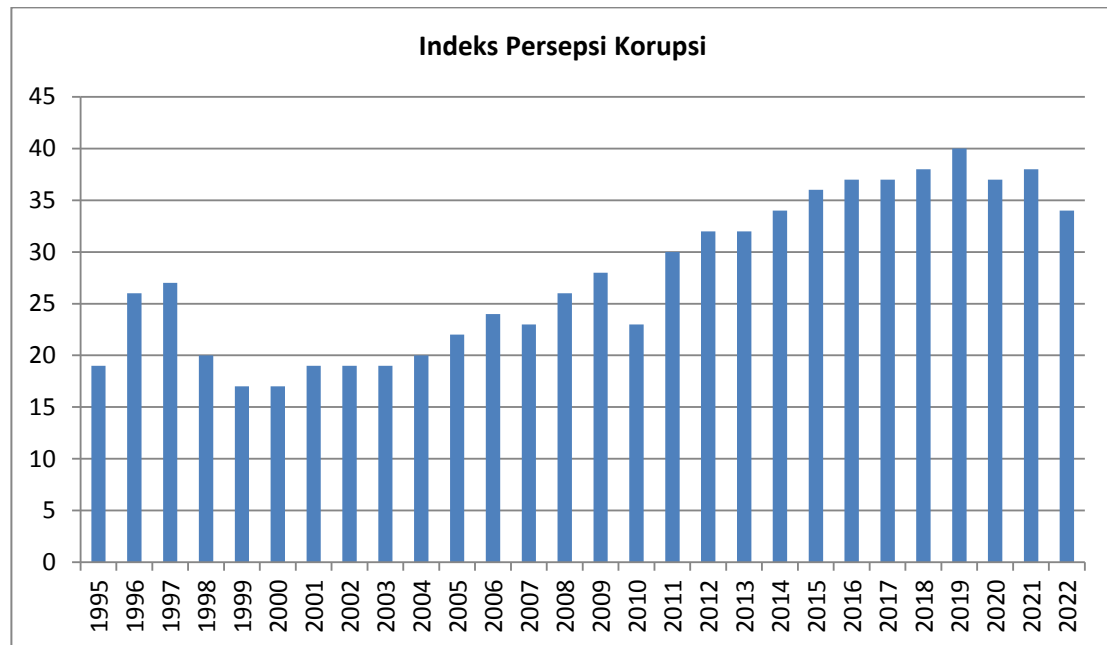
pembangunan dan digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian suatu negara. Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ketergantungan akan utang luar negeri, karena utang luar negeri dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan modal di dalam negeri, sehingga dana yang dipinjam harus dialokasikan dengan baik untuk pengeluaran yang produktif. Meskipun utang luar negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi namun ketergantungan akan utang luar negeri memiliki dampak yang serius bagi perekonomian dalam hal pengembalian pembayaran utang yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan dana yang lebih kecil untuk pembangunan didalam negeri dan peningkatan pajak untuk menutupi pembayaran utang, selain itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi akibat kurangnya pembangunan yang produktif yang disebabkan oleh menurunnya ruang fiskal pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Penelitian serupa yang menggabungkan utang luar negeri dan pembangunan ekonomi dilakukan yang dilakukan oleh (Brass, 2016) dimana Pembangunan ekonomi adalah perbaikan keadaan perekonomian dengan mengacu kepada history suatu negara. Begitu juga dengan Indonesia pembangunan ekonomi Indonesia dilatarbelakangi oleh Fenomena-fenomena kongkret yang terjadi, fenomena yang mendorong suatu negara untuk melakukan pembangunan atau inovasi- inovasi (Schumpeter & Backhaus, 2006).

Tingginya angka Indeks persepsi korupsi menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan korupsi. Korupsi yang seperti sudah membudaya membuat sebagian dari kekayaan negara hanya dinikmati oleh orang –orang tertentu yang

tidak tersentuh oleh hukum. Salah satu ciri negara berkembang adalah maraknya korupsi di dalam negeri. Korupsi adalah masalah yang sudah lama ada di berbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju. Korupsi telah banyak menimbulkan kerugian di berbagai sektor, dimana dampak dari korupsi dapat mengacaukan perekonomian dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. (Ichvani & Sasana, 2019) dan (Akman & A.H Sapha, 2018) serta (Nawarmi, 2014).

Korupsi dapat merusak pertumbuhan ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian, korupsi dapat menghambat pembangunan dan merupakan salah satu penyebab tingkat pendapatan rendah sehingga terjebak dalam kemiskinan (Blackburn, 2012). Pendapat lain yang menganggap bahwa dengan memudahkan birokrasi (*oiling the wheel*), korupsi dapat bermanfaat bagi perekonomian (Lui, 1996), Hasil penelitian yang lain ditunjukkan oleh (Guriev, 2004) dan (Tanzi, 1998) yang mengklaim bahwa korupsi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya birokrasi yang tinggi, dapat menghambat investasi, mendistorsi alokasi sumber daya, menciptakan ketidakpastian dan inefisiensi serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.



**Sumber : Biro Statistik**

**Gambar 1.5 Indeks Persepsi korupsi tahun 1995-2022**

Grafik di atas terlihat bahwa Indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 1995 adalah sebesar 19 dan pada tahun 1996 naik menjadi 26 sementara pada tahun 1997 angka indeks persepsi korupsi sebesar 27. Pada tahun 1998 indeks persepsi korupsi turun menjadi 20 dan begitu pula pada tahun 1999 indeks persepsi korupsi masih mengalami penurunan dan berada di angka 17 dan begitu juga pada tahun 2000 masih mengalami penurunan dan berada di angka 17. Indeks persepsi korupsi selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini terlihat pada tahun 2001 sampai 2019, meskipun ada penurunan pada beberapa tahun tapi trend secara keseluruhan menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi mengalami peningkatan.

Dalam bukunya (Mauro,1995) menjelaskan bahwa korupsi merupakan fenomena yang terjadi di semua negara, tanpa melihat tingkat sosial dan

pembangunan ekonomi di suatu negara. Bila ditinjau dari sektor ekonomi, dimana korupsi dapat meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan adanya berbagai resiko dari korupsi yang terdeteksi, seperti pembatalan proyek atau perjanjian kerjasama. Namun pendapat lain mengemukakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi dengan memberi sogokan yang membuat pejabat membuat kebijakan baru atau aturan baru. Jika hal tersebut terjadi maka korupsi mengacaukan dunia perdagangan. Perusahaan yang dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, sehingga tidak adanya kompetensi yang membuat hasil yang tidak efisien.

Dampak negatif korupsi yaitu menimbulkan distorsi pada sektor publik dengan mengalihkan pembangunan-pembangunan publik ke dalam masyarakat dimana bisa mendapatkan banyak keuntungan. Korupsi memiliki dampak penghancuran yang hebat (*an enormous destruction effects*) terhadap sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi juga memiliki korelasi negatif dengan tingkat pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan.

Meningkatnya korupsi akan melonjakkan utang negara yang dapat mengakibatkan *misallocation of resources* yang mengakibatkan perekonomian tidak optimal. Korupsi dapat menghambat investasi, korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikan ke negara-negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri ingin

berinvestasi pada negara yang bebas korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara yang rawan korupsi memang sangat beralasan karena modal yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor.

Dampak korupsi pada pembangunan dimana korupsi secara langsung dan tidak langsung menurunkan pertumbuhan pembangunan (Mauro, 1982), (Mauro, 1995) Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa substansi korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi negara tersebut. Oleh sebab itu korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian aktual *growth* dari nilai potensial *growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai pembangunan ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya dan ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan yang ingin dicapai. Korupsi dapat pula melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Korupsi dapat memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan (Tiongson *et al.*, 2001). Pada institusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah.

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan, baik di lembaga publik maupun swasta, untuk keuntungan pribadi. Ada dua alasan utama korupsi harus diberantas, pertama korupsi menghambat kinerja pertumbuhan ekonomi (*economic performance*), karena tata kelola kelembagaan yang lemah cenderung



mendorong terjadinya korupsi serta menghambat perbaikan performa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Keefer & Knack, 1997) dan (Quazi, 2014).

Berdasarkan fenomena yang terjadi antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2022, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Dimana merupakan salah satu indikator untuk mengukur berkembangnya suatu negara yang diikuti oleh tingginya pembangunan di berbagai sektor.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
3. Apakah utang luar negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ?
4. Apakah korupsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pembangunan infrastruktur jalan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia..

2. Menguji dan menganalisis inflasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Menguji dan menganalisis utang luar negeri dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Menguji dan menganalisis korupsi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pembangunan ekonomi
2. Menambah pengetahuan tentang bagaimana pembangunan di berbagai sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Menambah khasanah pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor lain yang mempengaruhinya.
4. Menjadi bahan referensi dalam kebijakan pengambilan kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia serta memberikan cakrawala bagaimana sektor sektor pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Untuk membuka dan menambah cakrawala wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pandangan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
2. Dapat di jadikan sebagai pengaplikasian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.
- 3 Secara akademisi mamfaat penelitian ini adalah menjadi bahan masukan dan saran bagi akademi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan studi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai informasi untuk penelitian yang akan datang serta memperkaya ilmu pengetahuan.
- 4 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan mengenai cara pandang pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadikannya sebagai bahan referensi untuk penelitian yang selanjutnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1. *The Stage Of Economic Growth***

Teori ekonomi pembangunan yang membahas perekonomian secara makro yaitu teori *The Stage Of Economic Growth* tahun sembilan ratus enam puluh. Teori ini menjelaskan pembangunan secara menyeluruh. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern melalui proses multidimensional dan pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dengan terjadinya perubahan maka akan memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan dan penggunaan tabungan sebaik- baiknya. Adapun perubahan yang dimaksud oleh Rostow adalah kemampuan masyarakat untuk mengikuti atau menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat inovasi baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Selain itu harus ada pula orang-orang yang menciptakan tabungan dan entrepreneur yang melakukan usaha yang inovatif untuk menaikkan produksi dan meningkatkan produktivitas.

Semakin meningkatnya pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan hanya tergantung dari kenaikan tabungan tetapi kepada perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Menurut (Rostow,1960) kenaikan tingkat pembangunan hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor prasarana dan sektor

sektor lain harus terjadi secara bersama-sama dengan proses peningkatan pembangunan dibidang prasarana dimana memiliki ciri yaitu tenggang waktu antara pembangunan dan pemetikan hasilnya [*gestation period*] sangat lama, pembangunan yang dilakukan secara besar besaran dan memerlukan biaya yang banyak dan pemanfaatan pembangunannya dinikmati oleh masyarakat banyak. Berdasarkan sifatnya maka pembangunan prasarana sangat penting dilakukan oleh pemerintah, (Mahalli, 2015)

Pembangunan infrastruktur jalan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur jalan memfasilitasi peningkatan mobilisasi kegiatan unit-unit ekonomi di dalam dan keluar dari satu daerah ke daerah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur Jalan raya memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat, manfaat sosial dan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur sangat nampak memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang akhirnya berdampak kepada tabungan masyarakat.

Menurut Rostow (1960) dalam Mahalli (2015) transisi dari keterbelakangan ke perekonomian maju dan terbarukan dapat diuraikan dalam serangkaian langkah dan tahap yang harus dilalui semua negara, hal ini dikemukakan dalam *The Stage Of Economic Growth*. Di dalam buku tersebut Rostow menyebutkan bahwa negara negara maju telah melewati masa untuk lepas landas ke pertumbuhan berkelanjutan dengan sendirinya sedangkan negara negara berkembang masih berada dimasa prakondisi dimana negara tersebut hanya perlu mengikuti serangkaian aturan pertumbuhan ekonomi untuk menuju lepas landas ke pertumbuhan berkelanjutan. Namun tak bisa di pungkri bahwa untuk menuju ke

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tersebut banyak tahapan sulit yang harus dilalui.

### **2.1.2. Teori ketergantungan dan modernisasi**

Secara historis ketergantungan bangsa Indonesia terhadap utang luar negeri sudah ada sejak masa orde lama. Utang luar negeri dianggap sebagai mesin utama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Utang luar negeri dianggap mampu menciptakan pemerataan pembangunan dengan investasi besar yang dianggap mampu menciptakan perkembangan di suatu wilayah yang tentu berdampak terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju. Upaya pembangunan ekonomi di negara- negara tersebut, yang umumnya diprakarsai pemerintah, terkendala akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumber daya modal yang seringkali berperan sebagai Penggerak pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan sumber daya modal ini, maka pemerintah negara yang bersangkutan berusaha untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pilihan (Atmadja, 2000).

Pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di seluruh wilayah memerlukan modal yang besar. Bukan hanya di Indonesia, sebahagian besar negara Asia memiliki ketergantungan terhadap modal asing, seperti Malaysia dan Thailand, meskipun demikian kebijakan operasional penggunaan utang luar di

negara yang berbeda tentu menghasilkan hasil yang berbeda.( Sophia and Sulasmi Yati 2018).

Penjabaran Teori modernisasi dimana teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dicapai melalui proses pengembangan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk menciptakan individu modern. Salah satu faktor kunci dalam teori modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan memerlukan bantuan dari negara maju untuk membantu negara-negara berkembang.

Penggunaan utang luar negeri dengan tujuan pemerataan diseluruh wilayah Indonesia berpotensi memberikan potensi manfaat dan potensi resiko (Prihandoko, 2017). Utang luar negeri terbukti mampu memajukan pembangunan suatu wilayah yang dapat menggerakkan perekonomian dan menjadikan masyarakat tersebut konsumtif dan modern. Utang luar negeri mampu menggerakkan sektor pariwisata dan sektor perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.3. Teori Harrod Domar**

Teori Harrod Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang baik antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam penelitian yang dikemukakan Ayadi, F. S. and F. O. Ayadi, 2018 peran investasi infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan

negara, oleh karena itu semakin mudah proses investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal, pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari hal tersebut diatas artinya adanya pembangunan dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

Teori Harrod Domar menekankan bahwa betapa pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan negara untuk membiayai dan memperbaiki barang-barang publik yang mengalami kerusakan, oleh karena itu pembangunan dalam bentuk investasi dijadikan sebagai stok penambah modal. Pada akhirnya untuk mencapai steady-state growth, maka diperlukan situasi dan kondisi dimana para pelaku usaha memiliki harapan dan perspektif yang stabil serta membawa pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Harrod Domar Utang luar negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kerangka teori two Gap Model yang menunjukkan defisit pembiayaan investasi swasta yang terjadi karena tabungan lebih kecil dari investasi [ $I - S = \text{Resources Gap}$ ] dan defisit perdagangan yang disebabkan oleh import lebih besar dari ekspor (*Trade gap*). Disamping itu ada pula defisit yang disebabkan oleh penerimaan negara dari pajak lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah (*Fiscal Gap*). Brass, J. N. (2016).



#### 2.1.4. Teori *GONE (G ONE Theory)*

Merupakan teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi *Greeds, Oppurtunity, Need*. Teori ini menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dengan adanya sikap serakah yang dimiliki oleh individu seseorang atau sesuatu organisasi memiliki kesempatan untuk berlaku curang, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kesempatan berkaitan dengan keadaan masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau kosekwensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Jack Bologne dalam bukunya *The Accuntant handbook of Froud and Commercial Crime* yang dinyatakan oleh BPKP pada Srategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999, yang menjelaskan bahwa faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi *greeds* (keserakahan), *oppurtunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *eksposures* (pengungkapan) sangat erat lkaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi. Faktor faktor *Greeds* berkaitan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor faktor *oppurtunities* dan *eksposures* berhubungan dengan korban pembuatan kecurangan (Victim). (BPKP, 1999),

Menurut teori ini *Greeds*, keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang . Untuk mengendalikan setiap keerakahan ini perlu mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar. *Oppurtinties* atau kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi suatu masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk mngurangi kecurangan antara lain melalui keteladanan dari pimpinan organisasi.

*Needs* atau kebutuhan berkaitan dengan faktor faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu memberikan pendapatan atau gaji yang seimbang dengan kinerja yang di tunjukkan oleh suatu organisasi atau lembaga. (Toke S.Aidit, *et al* 2008)

#### **2.1.5. *Willingness and Opportunity***

Menurut teori ini korupsi terjadi karena adanya peluang yang diakibatkan lemahnya sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang kuat yang di dorong oleh keserakahan. Teori ini menjelaskan peluang dan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan korupsi. Karena pengawasan yang lemah maka dengan mudah pelaku korupsi memanfaatkan kesempatan yang di dorong oleh kebutuhan .

Kemauan (*Willingness*) merupakan faktor internal yang berupa pendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan sedangkan *Opportunity* merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistem pengendali internal atau kurangnya pengawasan. Jika sistem yang ada lemah ada banyak

peluang untuk korupsi. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya korupsi adalah memperbaiki sistem, misalnya dengan membuat sistem yang lebih akuntabel..

Dijelaskan dalam suatu teori yang disebut dengan *willingness and opportunity to corrupt* dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi terjadi ketika terdapat suatu kesempatan atau peluang kurangnya pengawasan sistem yang lemah dan lainnya dan nilai atau keinginan terdorong oleh kebutuhan atau keserakahan. Dari teori tersebut dapat kita pahami bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi adalah niat atau kegiatan yang dibarengi dengan munculnya peluang atau kesempatan, sehingga muncul tindak pidana korupsi. (Pusha *et al.*,2022).

#### **2.1.6. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan dengan kondisi perekonomian didalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaksud juga dengan proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang dibentuk dari kenaikan pendapatan nasional. Terbentuknya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pada pembangunan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat.

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \frac{(\text{PDBt} - \text{PDBt} - 1)}{\text{PDBt} - 1} \times 100 \%$$

Keterangan :

PDBt = PDB tahun t

PDBt – 1 = Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

Teori pertumbuhan ekonomi yang melandasi penelitian ini adalah teori pertumbuhan ekonomi neo klasik, dan klasik serta teori ekonomi baru.

Teori Harrod - Domar, dimana menekankan perlu adanya pembentukan modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. (Boediono, 1981). Menurut teori ini modal adalah faktor penting agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang (*Steady Growth*).

Robert Solow, dalam teorinya menjelaskan bahwa tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi, artinya semakin tinggi tingkat tabungan semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan bersumber tentang empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

Menurut Harrod Domar Utang luar negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kerangka teori two Gap Model yang menunjukkan defisit pembiayaan investasi swasta yang terjadi karena tabungan lebih kecil dari investasi ( $I < S = Resources\ Gap$ ) dan defisit perdagangan yang disebabkan oleh *import* lebih besar dari *eksport* (*Trade Gap*). Disamping itu ada pula defisit yang disebabkan oleh penerimaan negara dari pajak lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah (*Fiscal Gap*). Jika diasumsikan bahwa ekspor dan impor mencakup

barang dan jasa maka pengertian defisit perdagangan akan lebih diarahkan pada defisit dalam transaksi berjalan, dalam kerangka *two gap* model diatas tersirat bahwa bila suatu negara berada dalam keadaan dimana neraca transaksi berjalannya mengalami ketidakseimbangan, maka dibutuhkan aliran modal masuk (*capital inflows*). Namun jika suatu negara menghadapi masalah defisit neraca transaksi berjalan dan menggunakan aliran masuk sebagai jalan keluarnya, maka seharusnya negara tersebut juga menyiapkan kebijakan–kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan defisit tersebut. Semakin banyak restriksi dan kontrol akan semakin sulit bagi suatu negara untuk menurunkan defisit. Jika suatu negara sudah melakukan *Tight Money Policy* , menerapkan kebijaksanaan fiskal dan melakukan kontrol atas tarif impor, tetapi masih mengalami defisit neraca pembayaran, maka negara tersebut akan semakin sulit mengatasinya (Todaro, 1977).

#### 2.1.6.1 Teori Klasik

Menurut teori Adam Smith pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk, dengan semakin bertambahnya penduduk maka akan semakin bertambah output atau hasil. Teori ini tertuang dalam buku *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Berbeda halnya dengan David Ricardo, menurut David Ricardo dalam bukunya *The principle of political and taxation*. Pertumbuhan penduduk yang melimpah akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja, tenaga kerja yang melimpah akan menjadikan upah menurun, dan upah yang menurun hanya akan di gunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami *stasionary state*. (Boediono 1981).

#### 2.1.6.2. Teori Neoklasik

Menurut pendapat dari Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern dan hasil atau output. Menurut teori ini penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pembangunan, seperti yang disebutkan oleh Harrod-Domar. Modal harus di pakai secara efektif untuk menghasilkan output sehingga akan tercipta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. ( Boediono, 1981).

Selain teori klasik dan neoklasik ada teori baru pertumbuhan ekonomi yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu: Teori baru pertumbuhan ekonomi yang dikenal pada awal 1980 an, Teori ini mencoba menjelaskan mengapa ada negara yang mampu berkembang secara cepat dan mengapa juga ada negara yang memiliki pertumbuhan yang lambat. Teori ini menggabungkan tradisional dan modern, dan menjelaskan bahwa meskipun teori kalsik dan neoklasik sudah diterapkan, masih tetap memerlukan peranan pemerintah. Teori tahapan linear yang dikemukakan oleh Rostow dalam bukunya *Stage of economic growth*, memiliki model model pembangunan yang secara bertahap. Suatu negara dalam proses pembangunannya memiliki tahap tahap pembangunan yang pertama yaitu tahapan masyarakat tradisional dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dan tahapan yang kedua yaitu tahapan lepas landas, dimana ditandai oleh adanya aktifitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

yang mulai meningkat. Tahapan ini merupakan awal menuju perbaikan ekonomi yang di tandai produksi dan konsumsi di kalangan masyarakat meningkat.

Model pertumbuhan Harrod-Domar yang menunjukkan hubungan yang fungsional secara ekonomis antara berbagai variabel pokok ekonomi. Pada model ini tingkat GDP tergantung pada tingkat tabungan nasional ( $s$ ) dan sebaliknya akan menentukan tingkat rasio modal-output ( $K$ ) sehingga terbentuk persamaan  $g=s/k$ . Persamaan ini mengambil nama dua orang ekonom terkemuka yaitu, Sir Roy Harrod dari Inggris dan E.V Domar dari Amerika Serikat. Meskipun demikian muncul beberapa kritikan terhadap model pembangunan bertahap yaitu : Tahap awal pembangunan seperti yang di sebutkan dalam teori tersebut tidak selalu berlaku dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tidak cukup dengan tabungan dan investasi seperti yang di sebutkan dalam teori tersebut.

Model Perubahan struktur adalah model perubahan yang di lakukan oleh negara negara terbelakang untuk mentransformasikan sistem ekonomi tradisional mereka ke sistem ekonomi modern yang lebih maju dan berorientasi ke perkotaan serta memiliki sektor jasa- jasa dan industri manufaktur. Model ini menggunakan perangkat –perangkat neoklasik berupa konsep konsep harga dan alokasi sumber daya serta metode metode ekonometri untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi. Aliran perubahan struktur ini di dukung oleh W.Arthur Lewis dengan teorinya tentang surplus tenaga kerja dua sektor.

#### **2.1.7. Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum dapat sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan,

sanitasi, telp, dsb. Menurut MacMillan *Dictionary of modern economics* (1996) infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual, Sedang *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu infrastruktur merupakan faktor utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transformasi dan juga fasilitas pendukung lainnya.

Larimer (1994) menyatakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem infrastruktur meliputi variasi luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transformasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonomi juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschmann (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Todaro (2006) juga mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi.

Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar, seperti jaringan transportasi, komunikasi dan distribusi, utilitas, air, saluran air dan sistem persediaan energi (Todaro, 2011:82). Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan untuk fungsi pemerintahan dalam



penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial, (Stone dalam Prasetyo 2009 :225). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari hari masyarakat.”Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat” (Grigg dalam Prasetyo, 2009 :225).

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan seperti jalan dengan tersedianya infrastruktur fisik yang memadai, akan mendukung kelancaran ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa” (Susanto, 2012:194). Fungsi daripada pembangunan infrastruktur adalah untuk kelancaran arus barang dan jasa, infrastruktur jalan akan memberikan dampak yang besar untuk distribusi produksi. Infrastruktur merupakan peningkatan aksesibilitas yang mampu untuk memfasilitasi mobilitas barang dan jasa yang lebih efisien. Pengadaan infrastruktur merupakan hasil penawaran dan permintaan, ditambah dari kebijakan publik (Canning,1998). Kebijakan publik memainkan peran yang besar terutama karena ketiadaan dan ketidaksempurnaan mekanisme harga pada pengadaan infrastruktur. Namun peningkatan pengadaan infrastruktur terhadap pendapatan tidak dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas pendapatan dari permintaan (*income elasticity of demand*) kecuali biaya infrastruktur sama di semua negara. *The world Bank* menunjukkan biaya pembangunan jalan di negara berpendapatan menengah kurang lebih 2/3 dari negara kaya dan negara miskin, hal ini menunjukkan bahwa

hubungan GDP per kapita dengan infrastruktur merupakan hasil interaksi yang kompleks lebih dari sekedar penawaran dan permintaan.

Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki peran penting disuatu daerah dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah serta memicu kegiatan produksi (Nugraheni & Priyarsono, 2012). Pembangunan infrastruktur khususnya jalan sangat diperlukan di Indonesia. Menurut (D. A. Kurniawan, 2010) infrastruktur jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Peningkatan kualitas permukaan jalan akan mendorong tumbuhnya aktifitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan penduduk.

Penelitian yang serupa yang dijelaskan dalam buku *the Growth and distributive impact of public infrastructure investment* menyatakan bahwa peningkatan investasi dalam sektor publik seperti jalan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal yang lebih tinggi, dan berdampak pada produksi agregat, alokasi sektoral produksi, kesejahteraan rumah tangga kemiskinan dan kesetaraan ekonomi. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Corong et al., 2013) yang menyatakan bahwa infrastruktur publik yang semakin baik akan meningkatkan PDB dan menghasilkan efek GDP yang positif dan mengurangi kemiskinan serta ketidcaksetaraan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berbagai penelitian diatas sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tabhun 2005-2025 di mana terdapat visi dan misi Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi pembangunan dan berkeadilan yakni untuk meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok atau wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender (LP3ES,BAPPENAS)

Dalam sejarah perencanaan pembangunan indonesia 1945-2025 : hal 34 – 2012, dimana pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai jika ada infrastruktur yang baik yang menghubungkan wilayah antara daerah, hal ini sesuai dengan teori *dual economy* W.Arthur lewis dan Simon Kuznets yang mengacu pada sebuah sektor yang relatif berkembang (*advanced sector*) dan sebuah sector yang relatif terbelakang (*backward sector*), menurut Kuznets esensi dari pertumbuhan ekonomi modern adalah pergeseran produksi secara bertahap dari sektor berpendapatan rendah menuju sektor berpendapatan tinggi.

Pembangunan jalan menggunakan utang luar negeri berarti negara harus mengambil pinjaman dari luar. Utang tersebut harus dikembalikan dengan membayar bunga dan pokok pinjaman. Jika utang tidak dikelola dengan baik beban utang dapat meningkat seiring waktu dan mempengaruhi stabilitas keuangan negara. Pembayaran utang yang tinggi dapat membatasi kemampuan negara untuk

mengalokasikan dana ke sektor sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan atau infrastruktur lainnya. Selain hal tersebut ketika nilai mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, misalnya akibat fluktuasi pasar mata uang, beban utang dalam mata uang lokal meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar utang luar negeri dan mengganggu stabilitas perekonomian negara. Utang luar negeri yang digunakan untuk membangun jalan harus di arahkan dengan bijaksana, namun terkadang ada resiko penggunaan dana yang tidak optimal atau penyalagunaan dana oleh pihak yang bertanggung jawab

#### **2.1.9. Teori Inflasi**

Adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Pengertian di atas adalah harga dari semua kebutuhan masyarakat, sedangkan terus-menerus berarti semua kenaikan barang terjadi bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Kenaikan harga suatu barang dan jasa bisa terjadi apabila permintaan banyak tetapi berbanding terbalik dengan penawaran atau ketersediaan barang dan jasa di pasar yang tetap atau bahkan menurun.

Menurut Bank Indonesia (BI), pengertian inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, inflasi tidak terjadi begitu saja, tapi disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi.

Selengkapnya, berikut ini adalah beberapa penyebab inflasi:

### **1. Meningkatnya Permintaan (*Demand Pull Inflation*)**

Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang/ jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang / jasa tersebut terjadi secara agregat atau *agregat demand*.(Lorenzoni, 2009). Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Meningkatnya belanja pemerintah, Meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, Meningkatnya permintaan barang untuk swasta

### **2. Meningkatnya Biaya Produksi (*Cost Pull Inflation*)**

Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya: bahan bakar naik dan upah buruh naik.

### **3. Tingginya Peredaran Uang**

Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, dimana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi.

Adapun jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya adalah pertama Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu

perekonomian suatu negara yaitu dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum di bawah 10 % per tahun dan dapat dengan mudah dikendalikan, kedua Inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara yaitu berada di kisaran 10% - 30% per tahun, ketiga Inflasi berat yaitu inflasi yang bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara dan berada di kisaran 30%-100% pertahun dan yang terakhir yaitu .Inflasi yang sangat berat yaitu hiperinflasi dimana inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun telah dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun (Bezrukov et al., 2011)

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

Demand pull inflation yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang dan jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen, cost push inflation yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran akan barang naik, *Bottle neck inflation* yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan.

Berdasarkan sumbernya inflasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri , inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan, inflasi jenis ini dapat terjadi ketika jumlah barang dan jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga naik.

2. Imported inflation yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri, inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas dimana ada kenaikan harga di luar negeri, contohnya indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain dan ternyata harga barang-barang modal di negara tersebut naik,kenaikan harga tersebut berdampak bagi indonesia sehingga mengakibatkan inflasi.

Ada tiga teori inflasi yang sering digunakan yaitu:Teori kuantitas dimana menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah uang yang beredar maka harga-harga akan naik.(Teles et al., 2016), Teori Keynes yaitu teori yang menjelaskan bahwa ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang barang dan jasa secara berlebihan, sesuai dengan hukum ekonomi semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap maka harga-harga akan naik (Keynes, 2018) dan Teori struktural, dimana menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akan suatu barang.

#### **2.1.10. Utang Luar Negeri.**

##### **2.1.10.1 Utang Negara dalam APBN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disingkat APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN memuat rincian yang sistematis atas rencana pendapatan yang akan diterima dan nilai pagu maksimal yang akan dibelanjakan oleh negara. APBN Indonesia hingga kini masih menerapkan sistem penganggaran defisit. Hal inilah yang menyebabkan terdapat kolom pembiayaan dalam APBN

untuk mengisi nilai pendapatan pembiayaan (netto) yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendapatan negara. Untuk menutupi kekurangan pendapatan negara tersebut banyak cara yang dapat dipilih dari sekian banyak opsi seperti penjualan aset yang dimiliki, utang dan lainnya. Namun dari semuanya itu, utang (terlepas apapun jenisnya) merupakan instrumen yang paling sering digunakan pemerintah dalam pelaksanaan APBN, karena memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan, tingkat fleksibilitas yang tinggi (dari segi waktu, jenis dan sumbernya), dan kapasitas yang sangat besar.

#### **2.1.10.2. Fungsi Utang Negara**

Fungsi dari adanya utang negara ini diantaranya: menutupi defisit anggaran. Menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Sebagai solusi dalam penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan permasalahan baru. Namun pendefinisian ini baru bisa dibenarkan bila utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Utang luar negeri di Indonesia yang disajikan dalam publikasi ini adalah ULN pemerintah, bank sentral dan swasta. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat,

Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan



cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk (Bank Indonesia,2011).

Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang .

Menurut teori Harrod Domar, utang luar negeri di negara berkembang disebabkan oleh ketidakcukupan tabungan domestik untuk membiayai pembangunan. Penjelasannya sebagai berikut, angka pertumbuhan (*growth*),

diperoleh dengan membagi tabungan domestik (saving), dengan rasio output kapital. Apabila tabungan domestik tidak mencukupi, untuk mengejar proyeksi angka pertumbuhan tinggi, diperlukan utang luar negeri. Teori yang dikembangkan oleh Sir Roy Harrod (Inggris) dan kemudian dikenal dengan teori Harrod-Domar. Teori yang berbicara tentang penggunaan utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ekonom seperti Hollis Chenery, Alan Strout, dan lain-lain pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pemikiran mereka seperti yang diungkapkan oleh Chenery dan Carter (1973) dapat dikelompokkan ke dalam empat pemikiran mendasar. Pertama, sumber dana *eksternal* (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai suatu dasar yang signifikan untuk mendorong kenaikan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan perubahan dan perombakan yang substansial dalam struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting mobilisasi sumber dana dan transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing akan menjadi menurun setelah perubahan struktural terjadi. Pemikiran di atas sedemikian kuatnya mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang yang semata-mata hanya mengandalkan upaya proses pembangunannya pada sumber-sumber daya domestik. (H. B. Chenery & Strout, 1966), (H. Chenery & Carter, 1973).

Fenomena besarnya utang luar negeri Indonesia disebabkan oleh dua hal, pertama faktor internal. Pemerintah Orde Baru pada awal tahun 60-an mengesahkan UU Penanaman Modal pada tahun 1967. UU tersebut berimplikasi

terhadap arus modal asing di Indonesia. Pada awal 70-an pemerintah Indonesia seolah-olah mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia mulai memasuki era market economy sehingga modal asing (termasuk ULN) sangat diharapkan. Akan tetapi, kebiasaan mengharapkan utang luar negeri ini mengakibatkan ketergantungan terhadap utang luar negeri dan sedikit banyak membunuh kreativitas para ekonom pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan dalam negeri. Kedua faktor eksternal Lembaga donor asing memandang Indonesia pada akhir 60-an mengalami masa transisi baik secara ekonomi maupun politik, sehingga membutuhkan bantuan. Dalam perkembangannya, ketika Indonesia mengalami booming ekonomi pada awal dekade 90-an, para kreditor dengan senang hati memberi pinjaman kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain Indonesia termasuk negara yang taat dalam soal pembayaran utang, prospek ekonomi Indonesia yang demikian cerah menambah optimisme para kreditor bahwa pinjaman mereka akan memberikan penghasilan berupa bunga dalam jumlah besar

#### **2.1.11. Korupsi**

Pengertian korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah

atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan, Aperia, N., Dincer, O. C., & Payne, J. E. (2012).

Pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Secara etimologis istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, menyogok. Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu Pengertian korupsi menurut UU No.24 Tahun 1960 adalah sebuah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau melawan hukum. Sementara pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Adapun pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum, Penyalahgunaan kewenangan,

kesempatan, atau sarana, Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ada beberapa bentuk-bentuk korupsi dilihat dari tindakannya seperti memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), Penggelapan dalam jabatan pemerasan dalam jabatan, Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara). menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara). Korupsi tentu menimbulkan banyak dampak negatif. Berikut merupakan beberapa dampak dan efek korupsi seperti merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi, (Mauro, 1995). Korupsi juga mampu mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan, menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan (Olken, 2009).

Faktor internal penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk didalam faktor internal ini diantaranya: sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang, gaya hidup konsumtif, perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Sedang Faktor eksternal penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor

eksternal tersebut diantaranya : Faktor ekonomi, adanya kebutuhan akan ekonomi yang lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja, mendorong seseorang melakukan korupsi, faktor politik, dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif, faktor organisasi, dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas, faktor hukum, seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum. (Rose-Ackerman, 2008)

Ada banyak sekali bentuk dan contoh tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, mulai dari pegawai rendah hingga pejabat negara. Mengacu pada pengertian korupsi, adapun beberapa jenis dan bentuk korupsi adalah sebagai berikut : *Bribery* atau penyuapan adalah suatu tindakan memberikan uang / imbalan kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Apergis *et al.*, 2012). Bentuk penyuapan tersebut misalnya memberikan atau menjanjikan sesuatu (uang atau lainnya) kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara, *embezzlement* atau penggelapan adalah suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Bentuk penggelapan

tersebut misalnya; membuat faktur tagihan fiktif. Menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi, penggelembungan biaya perjalanan dinas, *Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja dimana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuk *fraud* tersebut misalnya; penggelapan uang kas dengan cara mengundur-undur waktu pencatatan penerimaan kas dan memanipulasi atau mendistorsi informasi / fakta untuk kepentingan tertentu, *extortion* atau pemerasan adalah suatu tindakan koruptif dimana seseorang atau kelompok melakukan ancaman secara zalim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam. Bentuk pemerasan tersebut misalnya; ancaman perusakan properti bila tidak memberikan uang keamanan dan pemerasan dengan cara ancaman merusak reputasi seseorang, *Favouritism* atau tindakan pilih kasih adalah suatu mekanisme koruptif dimana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaannya yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.

Korupsi memiliki dampak negatif yang besar *an enormous destruktion effects* terhadap sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi juga memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Disisi lain meningkatnya korupsi akan meningkatkan biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources* sehingga perekonomian tidak optimal (Mauro, 1995).

Korupsi dapat menghambat pembangunan, korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menanamkan modalnya ke negara-negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya karena memberikan pinjaman kepada negara negara korup akan merugikan dirinya karena memiliki biaya siluman yang tinggi.

Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi dimana korupsi secara langsung dan tidak langsung menurunkan pertumbuhan investasi (Mauro, 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi disuatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam. Oleh sebab itu korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian *aktual growth* dari nilai potensial *growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya dan ini berdampak pada menurunnya growth yang dicapai.

Korupsi dapat melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Pada institusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih



baik dan murah. Tetapi sebaliknya pada institusi pemerintahan yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan buruk. (Tiongson et al., 2000).

Menurut Bank Dunia (2005), korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan, baik di lembaga publik maupun swasta untuk keuntungan pribadi. Ada dua alasan utama korupsi harus diberantas, pertama korupsi menghambat *performonce ekonomi (economic performance)*, karena tata kelola kelembagaan yang lemah cenderung mendorong terjadinya korupsi serta menghambat perbaikan performa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi (Keefer & Knack, 1997),(Quazi, 2014).

Beberapa negara yang memiliki tingkat indeks persepsi korupsi rendah yaitu Denmark, Selandia Baru, Swedia, Singapura dan Finlandia yang dinyatakan *transparency internasional* memiliki tingkat korupsi rendah, negara-negara tersebut memiliki performa ekonomi yang prima, baik dari PDB, produktivitas tenaga kerja, maupun ketimpangan ekonomi. Pada tahun 2018, misalnya indeks persepsi korupsi (IPK) Denmark sebesar 88 atau negara paling bersih dari korupsi di sektor publik. Denmark pada tahun itu merupakan negara yang mempunyai kapasitas perekonomian yang baik dengan PDB US\$ 350.874 milyar, pendapatan per kapita US\$ 60,695, inflasi 0,74% dan ketimpangan ekonominya relatif lebih rendah (27,9) dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Korupsi, ketidaktransparanan, dan ketidakstabilan kebijakan ekonomi, serta lembaga pemerintah yang tidak efisien akan meningkatkan

resiko dan ketidakpastian lingkungan bisnis sehingga mengurangi aliran modal asing yang masuk karena korupsi di lembaga pemerintah akan mendistorsi pembangunan publik (Drabek & Payne, 2002).

### **2.2.1. Keterkaitan Teoritis Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Brass, J. N. (2016) sektor yang mendukung agar terjadi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur publik seperti pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan dana yang relatif besar. Adapun langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah dengan mencari sumber pembiayaan dari luar berupa utang luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan teori Harrod domar yang menjelaskan tentang pentingnya akumulasi modal dalam melakukan investasi. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan investasi yang menggunakan anggaran yang besar, dimana Indonesia sebagai negara berkembang masih menggunakan utang luar negeri sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan modal yang ada didalam negeri. Hal ini sejalan dengan teori ketergantungan dan modernisasi yang mana menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih bergantung kepada utang luar negeri dalam mengatasi kendala anggaran di dalam negeri.

Penambahan jumlah utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sebab terjadinya *debt overhang* dan *crowding out*. *Debt overhang* dapat di jelaskan sebagai kondisi penambahan jumlah utang berbalik menjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedang *crowding out effect*

adalah kondisi dimana beban pembayaran utang luar negeri mendesak keluar partisipasi swasta dalam perekonomian. Meskipun demikian pembenaran tentang pentingnya utang luar negeri untuk membiayai pembangunan konsisten dengan teori *two gap model* dari Chennery dan Strout (1966). Pada *gap* pertama adalah *saving gap* yaitu selisih antara jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan dengan tingkat tabungan yang tersedia. *Gap* kedua adalah *gap* perdagangan atau *gap* nilai tukar yaitu selisih antara kebutuhan impor untuk mencapai tingkat produksi tertentu dengan persediaan valas yang ada di dalam negeri. Kedua teori tersebut diatas, teori neoklasik dan *two gap model* mendukung penggunaan utang luar negeri sebagai dana eksternal untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur jalan menggunakan anggaran yang relatif besar dan untuk pencapaian pembangunan infrastruktur tentu pemerintah menggunakan utang luar negeri, karena kemampuan negara dalam membiayai pembangunan sangat terbatas. Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang masih bergantung pada utang luar negeri. Hal tersebut di karenakan ketidkadcukupan dana dari dalam negeri untuk melakukan pembangunan sehingga tercipta perubahan yang bermuara kepada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan teori Rostow yang menekankan perlunya perubahan-perubahan dalam suatu negara sehingga tercipta kemajuan di dalam negara tersebut.

Teori Harrod Domar yang menjelaskan perlunya modal yang besar untuk melakukan pembangunan. Salah satu pembangunan yang menggunakan anggaran yang cukup besar adalah pembangunan infrasturtur jalan. Tanpa akumulasi modal

maka pembangunan akan sulit tercapai. Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun dipergunakan untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kenaikan utang setiap tahun masih wajar karena utang tersebut digunakan untuk kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan akan memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal sosial. Pembangunan dalam infrastruktur jalan tentu menggunakan modal yang besar dan lahan untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan akan meningkatkan pelayanan sistem distribusi barang dan jasa terutama wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, serta dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra perekonomian. Selain itu pembangunan jalan mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting bagi suatu wilayah. Dengan adanya investasi pembangunan jalan tentu akan memacu sektor lain seperti transportasi yang lebih efisien dan akan memacu sektor lain yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pembangunan jalan akan memberikan manfaat dan tujuan strategis seperti membuka lapangan kerja dalam skala besar yang tentu akan mendorong konsumsi, pengalihan sumber daya dalam negeri yang akan meningkatkan produksi, mendorong kembalinya fungsi intermediasi perbankan ke sektor produktif demi terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

berkesinambungan, menciptakan kegiatan ekonomi daerah yang akan mendorong peningkatan PDRB dan memperlancar kegiatan ekspor, memacu kebangkitan sektor riil dengan menciptakan *multiple effect* bagi perekonomian Indonesia.

Utang luar negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan menutupi kekurangan modal yang ada di dalam negeri, namun peningkatan utang luar negeri yang terus menerus akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan tergolong dalam *debt overhang*. Beban utang yang terus melonjak dari tahun ke tahun bisa saja menjadi bomerang bagi pemerintah Indonesia, karena utang beserta bunga utang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan keuntungan dari investasi dengan utang luar negeri bisa saja mengalami kerugian jika terdapat kesalahan dalam tata kelola sehingga keuntungan dari investasi tidak mampu untuk membayar utang beserta bunganya sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun di sisi lain beban utang yang besar dapat mengakibatkan *debt overhang* namun di sisi lain utang dengan tata kelola yang baik dan menjadi sumber modal bagi pembiayaan setiap sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari hasil produksi yang memberikan keuntungan yang tidak tergolong dalam *debt overhang*

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun berikutnya adalah salah satu indikator penting yang harus diperhatikan untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Kekurangan modal, tabungan dan investasi masih sering menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang. Hal itu yang mendorong suatu negara mengambil jalan keluar

tercepat untuk menutup kekurangan modal bagi negaranya yaitu dengan cara melakukan utang luar negeri kepada negara-negara lain yang mampu memberikan pinjaman modal.

Pembangunan infrastruktur publik seperti pembangunan jalan akan berdampak pada kemajuan perekonomian, Pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan lapangan kerja selain itu akan mempermudah distribusi barang antar wilayah sehingga mampu memberikan efek limpahan terhadap sektor lain. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi klasik yang menekankan terciptanya tenaga kerja dan kesempatan kerja dan neoklasik yang menjelaskan tentang perlunya akumulasi modal, manusia, penggunaan teknologi modern serta output atau hasil.

### **2.2.2. Keterkaitan Teoritis Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Mendoza, (1995), defisit dapat mempengaruhi kas negara. Kekurangan atas biaya ini salah satunya dikarenakan adanya defisit neraca berjalan (X-M) yang di karenakan ketergantungan terhadap barang impor, hal ini berpengaruh pada nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada inflasi. Ketika nilai tukar melemah dan inflasi meningkat maka beban utang luar negeri akan semakin bertambah tinggi.

Dalam menganalisa hubungan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat digunakan teori *imported inflation*. Dimana saat Indonesia mengalami inflasi, maka nilai tukar rupiah terhadap dollar akan lemah. Indonesia masih tergantung produk dari luar baik bahan baku atau bahan setengah jadi di sektor barang dan jasa, sehingga pada saat terjadi inflasi pemerintah membutuhkan

dana yang besar memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi adalah berpengaruh positif.

Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus menerus, sehingga akan berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan tentu akan terjadi penurunan pendapatan nasional yang akan berdampak pada menurunnya angka pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan indikator *supply and demand*, yang akan mengakibatkan *supply* menurun dan *demand* menurun. Inflasi akan mengakibatkan keterbatasan sandang, pangan dan menghambat pembangunan dan kemajuan sektor- sektor lain sehingga pemerintah mengambil utang luar negeri sebagai solusi untuk menutupi defisit fiskal yang ada di dalam negeri. Inflasi yang menyebabkan keterbatasan sandang dan pangan serta tabungan pemerintah adalah suatu permasalahan yang dapat diatasi dengan mengambil utang luar negeri, (Phelps, Edmund (1973).

Pertumbuhan ekonomi merupakan "perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat" meningkat. Tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat kepada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Para pengusaha bersemangat memperluas

produksinya karena ada kenaikan harga yang di dapatkan oleh para pengusaha, selain itu peningkatan produksi memberi dampak positif lain yaitu tersedianya lapangan kerja baru, sebaliknya inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh, (Dornbusch, Rudiger 1977).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Vinayagathan 2013) Keberadaan level ambang untuk inflasi sangat penting dan bagaimana level tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan menggunakan regresi pertumbuhan ambang panel memungkinkan efek tetap dan endogenitas terhadap hubungan *nonlinear* antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk 32 negara Asia selama periode 1980-2009, dan mendeteksi ambang inflasi sekitar 5,43 % akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi dan dibawah 5,43% tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kuat.

Inflasi merupakan kondisi yang mempengaruhi sektor perekonomian, dimana terjadi kenaikan harga barang barang dan jasa secara umum. Pemerintah dalam mengendalikan inflasi yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter yaitu dengan menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat, dengan cara pemanfaatan penggunaan utang luar negeri ke hal yang produktif sehingga mampu meningkatkan sektor riil (barang dan jasa), (Korhonen, I., Nuutilainen, R., 2017). Inflasi keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dimana ketika terjadi inflasi yang tinggi akan membahayakan pertumbuhan ekonomi sedangkan inflasi karena shock temporer tidak di anggap berbahaya karena akan hilang dengan sendirinya.



Penelitian yang dilakukan oleh (Cagan, Phillip. 1956), mengemukakan adanya hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya mengemukakan inflasi yang tinggi akan menurunkan utang luar negeri karena pemerintah akan mencetak uang untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang di kemukakan oleh (Adaramola & Dada, 2020) penelitian yang di lakukan pada tahun 1980-2018 mengemukakan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

### **2.2.3 Keterkaitan Teoritis Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi**

Indonesia sebagai negara berkembang masih menggunakan utang luar negeri sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan modal yang ada di dalam negeri. Hal ini sejalan teori ketergantungan dan modernisasi yang mana menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih bergantung kepada utang luar negeri dalam mengatasi kendala anggaran yang ada didalam negeri.

Penambahan jumlah utang untuk membiayai pembangunan merupakan salah satu sebab terjadinya *debt overhang* dan *crowding out*. *Debt overhang* dapat dijelaskan sebagai kondisi penambahan jumlah utang berbalik menjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi sedang *crowding out effect* adalah kondisi dimana beban pembayaran utang luar negeri mendesak keluar partisipasi swasta dalam perekonomian. Meskipun demikian pembenaran tentang pentingnya utang luar negeri untuk membiayai pembangunan konsisten dengan teori *two gap model* dan Chenery dan Strout (1966). Pada gap pertama adalah *saving gap* yaitu selisih

antara jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan dengan tingkat tabungan yang tersedia. Gap kedua adalah gap perdagangan atau gap nilai tukar yaitu selisih antara kebutuhan impor untuk mencapai tingkat produksi tertentu dengan persediaan valas yang ada didalam negeri. kedua teori tersebut diatas, yaitu teori neoklasik dan *two gap model* mendukung penggunaan utang luar negeri sebagai dana *eksternal* untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Teori Harrod Domar yang menjelaskan perlunya modal yang besar untuk melakukan pembangunan. Tanpa akumulasi modal maka pembangunan akan sulit dicapai. Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya digunakan untuk kegiatan yang produktif yang akan memacu pertumbuhan ekonomi dengan menutupi kekurangan modal yang ada didalam negeri, namun peningkatan utang luar negeri yang secara terus menerus akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan tergolong dalam *debt overhang*. Beban utang yang terus melonjak dari tahun ke tahun bisa saja menjadi boomerang. Bagi pemerintah Indonesia, karena utang serta bunga utang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun di sisi lain beban utang yang besar dapat mengakibatkan *debt overhang* namun disisi lain utang dengan tata kelola yang baik dan menjadi sumber modal bagi pembiayaan bagi setiap sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari hasil produksi yang memberikan keuntungan yang tidak tergolong dalam *debt overhang*.

Menurut Rogoff (2009) menemukan bahwa tingkat utang yang tinggi dapat dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Mereka beranggapan

bahwa negara negara yang memiliki rasio utang yang tinggi terhadap PDB cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat.

#### **2.2.4. Keterkaitan Teoritis korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi**

Mauro, Paolo.” Dalam bukunya *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*” menjelaskan bahwa bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi. Negara yang rawan korupsi akan menurunkan sektor sektor yang potensial yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan di negara tersebut dan menjelaskan keterkaitan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi tingkat korupsi maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfada, 2019) yang berjudul *The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model*, dengan data tahun 2004-2015 mengemukakan bahwa korupsi memberikan efek penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena kurangnya investasi akibat kekhawatiran negara pemberi pinjaman kepada negara yang rawan korupsi sehingga akan menurunkan tingkat pembangunan yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai negara, tak terkecuali negara Indonesia. Menurut survey yang telah di lakukan oleh *Transparency international, Corruption Perception Indeks (CPI)* Indonesia pada tahun 2019 berada di skor 40 dan skor ini meningkat 2 point dari tahun 2018.

Korupsi menurunkan investasi dan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut Ventelou, Bruno. "*Corruption In a Model of Growth: Political Reputation, Competition and Shocks.*" *Journal of Public Choice*, hal. 23 – 402002", menjelaskan bahwa korupsi secara nyata menurunkan investasi dan meningkatkan utang luar negeri, karena kekurangan anggaran untuk melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan teori *willingness and oppurtunitas* yang menjelaskan tentang lemahnya pengawasan pada sistem birokrasi pemerintahan sehingga korupsi tidak bisa hilang karena adanya kemauan dan peluang yang mengarah ke tindak korupsi

Berbagai upaya positif antikorupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah, komisi pemberantasan korupsi, kalangan pebisnis maupun masyarakat sipil. Akan tetapi tren kenaikan CPI dapat dikatakan sangat lambat hal ini terlihat dari data CPI beberapa tahun terakhir dimana Indonesia meraih skor berturut turut 36,37,38, dan 39. Skor ini tentu masih jauh dari target semula. Saat ini Indonesia berada di 30% negara terkorup di dunia.

Menurut Dornbusch, Rudiger. 1977 Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpengaruh pada eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi akan memperburuk kondisi perekonomian suatu negara dan dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Paulo Mauro menerangkan bahwa korupsi memiliki perbandingan terbalik dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Di sisi lain, meningkatnya korupsi juga mengakibatkan biaya barang dan jasa meningkat, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada saat

inilah inefisiensi akan terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktik korupsi.

Beberapa dampak yang memberikan negatif *value added* bagi perekonomian secara umum, yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, dimana korupsi dapat menyebabkan distorsi pada perekonomian. Mauro (*The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government*). Faktor utama yang membuat investor sulit menaruh kepercayaan menanamkan modalnya di Indonesia adalah praktik besar korupsi, yang dikarenakan ketika maraknya praktik korupsi terjadi, maka akan berimbas pada profit, produksi dan distribusi. Selain hal tersebut korupsi menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Korupsi akan meningkatkan utang negara. Korupsi mengakibatkan adanya defisit alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan pemerintah harus menutupi defisit tersebut dengan meningkatkan utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan hal yang wajar ketika dipergunakan untuk hal yang produktif, tetapi dampak terhadap ekonomi cukup besar apabila dipergunakan untuk hal yang tidak produktif.

Selain hal tersebut korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana publik. Korupsi berupa penggelapan, suap dan pungli dapat menyebabkan sarana dan prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur yang dapat menyebabkan anggaran berkurang, rendahnya kualitas infrastruktur yang dibangun. Rendahnya kualitas infrastruktur

tersebut dapat mengganggu akses masyarakat terhadap perekonomian. Korupsi dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan, korupsi akan memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor, dan menyebabkan anggaran belanja negara berkurang, akibatnya ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan publik di karenakan berpindahnya sumberdaya publik kepada koruptor. Ahlin, Christian R,2001. Ketergantungan negara berkembang terhadap utang luar negari selalu menimbulkan dampak bagi perekonomian negara berkembang. Utang luar negeri dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi masalah dalam perekonomian dengan menjadikan utang luar negeri sebagai solusi dalam mengatasi masalah. Dengan pemamfaatan seluruh sumberdaya dan kelanjutan pembangunan suatu perekonomian. Namun di sisi lain utang luar negeri dapat menghambat, bukannya memfasilitasi menuju pertumbuhan yang lebih baik di negara penerima utang luar negeri. (Geiger, L. T.1990),

Menurut Fosu, A. K. (2010), teori *debt overhang* digunakan untuk memberikan pemahaman tentang dampak utang luar negeri terhadap perekonomian. Teori ini berpendapat bahwa ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kenaikan suku bunga akibat kenaikan biaya pinjaman dimana kebutuhan pembayaran utang luar negeri yang terus meningkat

### **2.3. Tinjauan Empiris**

Kajian penelitian sebelumnya diperlukan untuk melihat dan mengetahui bagian yang belum diteliti dan bagian yang sudah diteliti. Berikut ini dikemukakan beberapa hasil studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini.

#### **2.3.1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan Infrastruktur jalan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai variabel yang berbeda. Kanwal,S *et al.*,(2020) mengungkapkan pembangunan infrastruktur jalan menggunakan anggaran yang besar, yang mana hasil dari pembangunan tersebut mampu menggerakkan sektor lain. Hasil empiris dari penelitian tersebut menemukan bahwa infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja yang baru, pembangunan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan sektor industri. Pembangunan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antara daerah dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Jaringan jalan yang baik akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan konektivitas antara wilayah yang dapat mendorong perdagangan serta investasi. Selain itu hasil penelitian dari Sanjeev Gupta *et al* (2005), Wang (2012) membenarkan bahwa anggaran yang besar dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan tersebut membenarkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki peranan penting sebagai roda penggerak perekonomian. Dalam pandangan yang lain pembangunan infrastruktur jalan memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan utang luar negeri (Gregoire Garsous

(2012). Hasil studi ini di bantah oleh Agbigbe William (2016) dan *Asian Development Bank* (2015) bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara spesifik Sumadisa, I. *et al.*,(2016) mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan lebih banyak menggunakan utang luar negeri, sehingga pemerintah harus membayar utang beserta bunga utang kepada negara peminjam dan hal ini tentu berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah yang menyempit dalam melakukan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Hasil empiris dari penelitian tersebut menemukan bahwa beban utang yang berlebihan yang harus dibayarkan negara kepada negara pemberi kredit sehingga pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk membayar bunga dan pokok utang yang dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk sektor lain yang juga penting bagi pertumbuhan ekonomi.

### **2.3.2. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai saluran. Menurut penelitian yang pernah diteliti oleh Vinayagathan, Thanabalasingam (2013); menganggap bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi empiris menemukan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa yang naik secara signifikan. Untuk membeli barang dan jasa masyarakat harus mengurangi pengeluaran konsumsi mereka. Hal ini dapat mengurangi permintaan agregat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil studi empiris menemukan



bahwa inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian di pasar dan melemahkan kepercayaan konsumen dan investor. Ketidakpastian ini dapat menghambat pengambilan keputusan investasi jangka panjang dan merusak iklim bisnis secara keseluruhan.

Secara spesifik hasil studi empiris Jordi Gali (1994) menemukan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengganggu alokasi sumber daya dan mengurangi investasi, yang akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian di atas sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff (2009) menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi sering kali terkait dengan krisis keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Mereka juga menemukan bahwa pemulihan ekonomi setelah krisis keuangan cenderung lebih lambat dalam negara-negara dengan inflasi yang tinggi. Hasil studi empiris tersebut dibantah oleh Robert Barro (1990), dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika harga-harga naik, keuntungan perusahaan meningkat dan ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Stanley Fischer dan Rudiger Dornbusch (1980) menganggap bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah ketika terjadi inflasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh mereka menemukan bahwa pada saat inflasi, pemerintah menurunkan suku bunga yang lebih rendah untuk mendorong investasi dan konsumsi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

### 2.3.3. Utang luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor dan konteks. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Saputra, Defrizal Aimon, Hasdi Adry, Melti Roza (2019). mengeksplorasi hubungan utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi, menurut penelitian mereka utang luar negeri berpengaruh menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Didu, Saharuddin (2018); menganggap bahwa utang luar negeri mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil studi empiris tersebut di bantah oleh Omodero, Cordelia Onyinyechi Alpheaus, Ogechi Eberechi (2013). menurut penelitian yang dilakukan oleh mereka utang luar negeri akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara makro karena akan membentuk *debt curve laffer* dalam perekonomian dan *debt curve laffer* merupakan kurva yang sering muncul pada negara berkembang dimana ketergantungan terhadap utang luar negeri akan menjadikan sumber daya alam tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena hanya dipakai untuk membayar utang luar negeri beserta bunga utang, beban utang luar negeri akan mempersempit ruang gerak untuk melakukan pembangunan di dalam negeri, sehingga kemajuan pembangunan sulit untuk tercapai.

Pandangan spesifik dari peneliti yang menolak utang luar negeri adalah adanya argumen bahwa utang luar negeri akan menciptakan beban finansial yang berat bagi negara peminjan. Pembayaran bunga dan pokok utang dapat menghabiskan sejumlah besar pendapatan pemerintah yang seharusnya

dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pada dasarnya utang luar negeri adalah jumlah utang yang dipinjam oleh suatu negara dari pemberi pinjaman di luar negeri. Utang ini dapat digunakan untuk membiayai proyek proyek pembangunan, investasi atau untuk kebutuhan fiskal yang tidak dapat di penuhi melalui pendapatan domestik. Pertumbuhan ekonomi di sisi lain mengacu pada peningkatan PDB suatu negara dari waktu ke waktu dan dapat di ukur dengan berbagai indikator seperti pertumbuhan PDB riil, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita.

Pendukung utang luar negeri berpendapat bahwa pinjaman dari luar negeri dapat memberikan sumber pendanaan yang diperlukan untuk membiayai investasi dan pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Utang tersebut dapat di gunakan untuk membangun infrastruktur, mengembangkan sektor industri, meningkatkan kapasitas produksi dan menggerakkan pertumbuhan sektor sektor ekonomi tertentu. Dalam beberapa kasus utang luar negeri juga dapat memberikan akses ke teknologi dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Namun kritik terhadap utang luar negeri merupakan salah satu keprihatinan utama dimana resiko kemampuan negara tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, hal ini dapat menyebabkan kestabilan ekonomi yang serius dan bahkan krisis keuangan. Utang yang tinggi akan akan menghabiskan sebagian besar pendapatan negara untuk pembayaran bunga dan pokok utang, menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai program program sosial dan investasi dalam sektor sektor penting lainnya.

Beberapa kasus dimana utang luar negeri akan menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap pemberi pinjaman asing. Negara yang terlalu bergantung pada utang luar negeri untuk membiayai pembangunan di dalam negeri rentan terhadap perubahan kondisi pasar global, fluktuasi suku bunga, atau ketidakstabilan keuangan internasional. Secara umum hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi tidaklah sederhana dan tergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat utang, pengelolaan utang yang baik, penggunaan dana pinjaman yang efektif dan kebijakan ekonomi yang tepat. Penting bagi suatu negara untuk memilih strategi yang dalam mengelola utang luar negeri dan memastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan dengan bijaksana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang

#### **2.3.4. Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Hubungan antara Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Quazi, R.M (2014) menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi membuat investor asing menolak untuk memberikan pinjaman atau investasi kepada negara yang terkena dampak korupsi. Korupsi mampu meningkatkan resiko bisnis yang tinggi. Akibatnya investor tidak dapat memberikan pinjaman dalam skala besar, sehingga menimbulkan kurangnya investasi yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian sebelumnya di dukung oeh penelitian yang dilkukan oleh Asiedu E, dan Freeman, J (2009) menunjukkan bahwa korupsi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam perekonomian. Korupsi mengganggu investasi, pengadaan kontrak atau alokasi dana publik yang didasarkan pada suap, nepotisme atau hubungan yang tidak sehat. Akibatnya produktifitas dan efisiensi ekonomi menurun dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Hasil penelitian tersebut di bantah oleh Lui,FT (1996) menganggap korupsi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan birokrasi dalam suatu negara. Birokrasi yang mudah akan memudahkan investor untuk mendapatkan ijin investasi dan tentu berdampak terhadap meningkatnya investasi yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara spesifik Rose-Ackerman mendukung bahwa korupsi memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya menemukan beberapa bentuk korupsi dapat memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks tertentu, ketika institusi dan sistem hukum lemah. Hasil studi empiris menemukan bahwa dalam beberapa kasus korupsi dapat mempercepat pengambilan keputusan. Suap atau pemberian gratifikasi kepada pejabat publik dapat membantu mengurangi birokrasi yang lambat. Pemberian suap dapat membuka jalan bagi pemberi suap untuk mendapatkan akses yang lebih cepat atau prioritas dalam mendapatkan layanan atau izin dari lembaga pemerintah.

## BAB III

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN TEORITIS

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori pembangunan ekonomi yaitu teori ketergantungan, teori modernisasi, teori klasik dan neo klasik. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya sehingga terbentuklah kerangka pemikiran yang teoritis. Variabel pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini sebagai variabel dependen sedangkan pembangunan infrastruktur jalan, inflasi, utang luar negeri, dan indeks persepsi korupsi sebagai variabel independen.

Obyek dalam penelitian ini adalah wilayah Indonesia dengan time series selama 28 tahun waktu pengamatan. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data kemenkeu yang sudah diolah, data Bank Indonesia yang sudah diolah dan dijadikan sebagai data sekunder.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur jalan merupakan sarana yang dapat memperlancar arus barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Pembangunan infrastruktur dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang baik memberikan kontribusi pada kelancaran distribusi arus barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi negara. Infrastruktur dapat mendorong minat investor asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pada industri pabrik saja namun perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan juga dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan karena akses jalan diperlukan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain guna kepentingan masyarakat daerah yang berada di sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur jalan. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian infrastruktur sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas umum dan menjadi kepentingan bersama yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat menjadi lebih baik. Penting untuk diingat adalah jika tidak ada infrastruktur jalan maka tidak akan ada mobilitas sosial dan juga pertukaran dalam hal ekonomi karena terhambat oleh ketiadaan jalan yang baik dan memadai.

Menurut (Khalique *et al.*, 2013) pembangunan dalam hal infrastruktur dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan kapital dapat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang dapat mendorong

adanya pengetahuan dan penemuan baru dalam bidang sains sehingga menjadi terobosan baru dan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Infrastruktur jalan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dimana terdapat banyak pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan infrastruktur jalan di kota antara lain memberikan kemudahan dalam pertukaran, perjalanan dan pelayanan masyarakat (Yannis *et al.*, 2013) .

Menurut (Kanwaletal.2020) Infrastruktur memberikan dampak terhadap pengangkutan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan yang semakin kuat. Pengangkutan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas sehingga budaya dan pariwisata dapat dikenal setiap negara. Infrastruktur menjadikan pengangkutan yang efisien yang memudahkan mobilitas segala daya termasuk kemampuan dan ketahanan nasional. Sistem pengangkutan yang mungkin efisien memungkinkan negara memindahkan dan pengangkut penduduk dari daerah yang mengalami bencana ke tempat yang lebih aman, stapi disisi negatif pembangunan infrastruktur akan berdampak pada lingkungan dimana terjadi pengrusakan lahan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan (Levinson *et al.*, 2007). Jalan bukan hanya sebagai akses untuk transportasi di dalam negeri saja tetapi lebih dari itu jalan merupakan faktor yang sangat penting bagi dunia pariwisata, dengan majunya pembangunan jalan maka sangat memungkinkan pembangunan sektor lain ikut berkembang terutama sektor pariwisata. Adapun yang menjadi variabel proksi dari pembangunan infrastruktur jalan adalah panjang jalan berdasarkan jenis permukaan dengan



mengambil data time series dari tahun 1995-2022, dimana jenis permukaan jalan ada dua jenis yaitu aspal dan bukan aspal.

Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Milton Friedman mengatakan inflasi ada dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil (Dornbusch & Fischer, 2001). Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produk nasional, Investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun.

Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.

Menurut teori Harrod Domar, utang luar negeri di negara berkembang disebabkan oleh ketidakcukupan tabungan domestik untuk membiayai pembangunan. Penjelasan sebagai berikut, angka pertumbuhan (*growth*), diperoleh dengan membagi tabungan domestik (*saving*), dengan rasio output kapital.

Apabila tabungan domestik tidak mencukupi, untuk mengejar proyeksi angka pertumbuhan tinggi, diperlukan utang luar negeri .

Teori yang dikembangkan oleh Sir Roy Harrod (Inggris) dan kemudian dikenal dengan teori Harrod-Domar. Teori yang berbicara tentang penggunaan utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan selanjutnya dikembangkan oleh beberapa ekonom seperti Hollis Chenery, Alan Strout, dan lain-lain pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pemikiran mereka seperti yang diungkapkan oleh Chenery dan Carter (1973) dapat dikelompokkan ke dalam empat pemikiran mendasar. Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai suatu dasar yang signifikan untuk memicu kenaikan investasi serta pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk menjaga dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi diperlukan perubahan dan perombakan yang substansial dalam struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting mobilisasi sumber dana dan transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing akan menjadi menurun setelah perubahan struktural terjadi. Pemikiran di atas sedemikian kuatnya mempengaruhi proses perencanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang yang semata-mata hanya mengandalkan upaya proses pembangunannya pada sumber-sumber daya domestik.(Hollis.B.Chenery & Strout, 1966),(H. Chenery & Carter, 1973).

Fenomena besarnya utang luar negeri Indonesia disebabkan oleh dua hal, pertama faktor internal. Pemerintah Orde Baru pada awal tahun 60-an mengesahkan UU Penanaman Modal pada tahun 1967. UU tersebut berimplikasi terhadap arus

modal asing di Indonesia pada awal 70-an pemerintah Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia mulai memasuki era *market economy* sehingga modal asing (termasuk ULN) sangat diharapkan. Akan tetapi, kebiasaan mengharapakan utang luar negeri ini mengakibatkan ketergantungan terhadap utang luar negeri dan sedikit banyak membunuh kreativitas para ekonom pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendanaan dalam negeri.

Faktor eksternal dimana lembaga donor asing memandang Indonesia pada akhir 60-an mengalami masa transisi baik secara ekonomi maupun politik, sehingga membutuhkan bantuan. Dalam perkembangannya, ketika Indonesia mengalami booming ekonomi pada awal dekade 90-an, para kreditor dengan senang hati memberi pinjaman kepada Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain Indonesia termasuk negara yang taat dalam soal pembayaran utang, prospek ekonomi Indonesia yang demikian cerah menambah optimisme para kreditor bahwa pinjaman mereka akan memberikan penghasilan berupa bunga dalam jumlah besar.

Teori pertumbuhan merupakan salah satu teori yang mencoba untuk menjelaskan fenomena perubahan sosial, khususnya pada masyarakat negara berkembang. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli dengan mengacu pada ide untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat negara berkembang. Teori awal dikelompokkan sebagai teori pertumbuhan klasik, yang selanjutnya ide-ide dari teori pertumbuhan klasik tersebut disempurnakan oleh kelompok Neo Klasik. Di lain pihak, munculnya dan perkembangan dari teori pertumbuhan itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh teori ilmu-ilmu sosial lainnya (Boediono, 1981). Pengeluaran

dalam bentuk pembangunan di setiap sektor dianggap mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma'ruf & Widiastuti, 2008)

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak ketertinggalannya dibidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju. Upaya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut, yang umumnya diprakarsai pemerintah, terkendala akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumber daya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator pembangunan.

Untuk mencukupi kekurangan sumber daya modal di dalam negeri maka pemerintah negara yang bersangkutan berusaha untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia

Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN RI dengan

cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya para wajib pajak di Indonesia. Peningkatan pengeluaran pemerintah tentu akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan PDB, namun pengeluaran pemerintah dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak terkendali akan membuat dana yang ada di dalam negeri tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pemerintah, sehingga pemerintah harus mencari pinjaman dari luar negeri yang tentu memberikan pengaruh terhadap PDB yang diakibatkan oleh penambahan utang luar negeri.

Menurut (Didu, 2017) utang luar negeri memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya utang luar negeri maka akan tercipta perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan adanya utang luar negeri maka pemerintah memiliki tambahan dana untuk membangun sarana-sarana infrastruktur seperti pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah wilayah pelosok yang terpencil dengan dengan daerah lainya yang dengan sendirinya akan tercipta arus barang dan jasa dalam masyarakat. Utang luar negeri memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya utang luar negeri, maka akan tercipta perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat.

Pengertian korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi dengan menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Menurut (Mauro, 1995), Korupsi tentu menimbulkan banyak dampak negatif. Berikut merupakan beberapa dampak dan efek korupsi seperti merugikan keuangan negara dan ekonomi nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi.

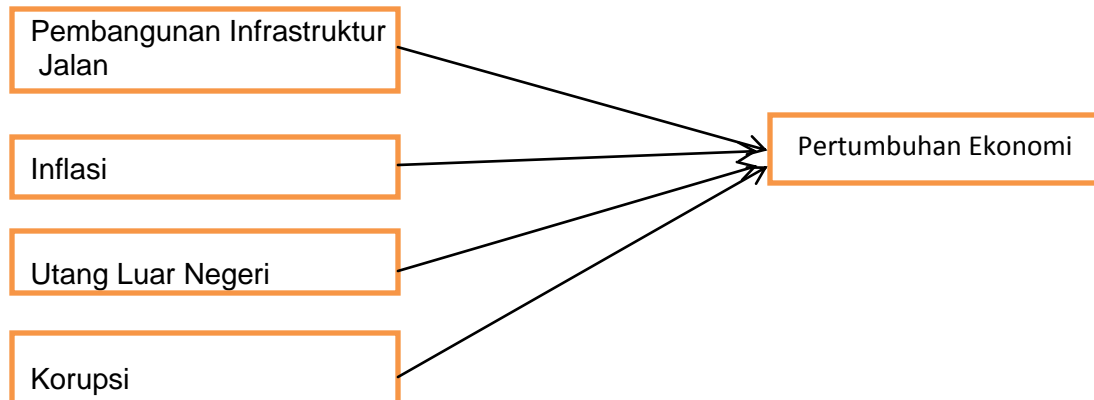
Menurut (Olken, 2009) korupsi bisa mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Penjelasan dari (Mauro, 1995) dimana korupsi memiliki dampak yang buruk, khususnya sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi juga memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Disisi lain meningkatnya korupsi akan meningkatkan biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Dampak korupsi dari perspektif ekonomi adalah *misallocation of resources* sehingga perekonomian tidak optimal .

Korupsi menghambat pembangunan, korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikan ke negara-negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan pembangunan di dalam negeri berkurang karena para investor luar negeri ingin

berinvestasi pada negara yang bebas korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Kondisi negara yang korup akan membuat negara pemberi pinjaman meninggalkannya karena memberikan pinjaman di negara korupsi akan merugikan dirinya karena memiliki biaya yang tinggi. Dampak korupsi pada pertumbuhan utang luar negeri dimana korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah menurunkan utang luar negeri (Mauro, 1995).

Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa substansi korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam. Oleh sebab itu korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian aktual *growth* dari nilai potensial *growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya dan ini berdampak pada menurunnya *growth* yang dicapai. Korupsi dapat melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Pada institusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Sedang di sisi lain korupsi dapat memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan (Tiongson *et al.*, 2000)

**Gambar 3.1. Gambar Kerangka konseptual**



### **3.2. Hipotesis**

Merupakan jawaban sementara yang diturunkan melalui teori terhadap masalah penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris dan merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antara variabel yang di pengaruhi di dalam penelitian. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat pengaruh positif pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga terdapat pengaruh negatif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga terdapat pengaruh positif utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga terdapat pengaruh negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.